Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Newsletter XI
Januari - Juni 2020


Akuntabilitas


FKPAR


FMS


FPM


Cerita Perubahan



Kementerian PPN/ Bappenas

MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Konsorsium PERMAMPU

Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Pimpinan Redaksi	Dina Lumbantobing	Kontributor	Direktur Eksekutif
Sekretaris Redaksi	King Ronald Silalahi		Koord Program
Editor Tulisan	Dina Lumbantobing		Staf Lapang Lembaga Anggota

SEKRETARIAT PERMAMPU
Jl. Pancur Siwah No. 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com Telp/Fax. 061-8361102
Facebook : PermampuConsortium, www.permampu.org

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Selamat bertemu di edisi ke 11 Newsletter kita, edisi terakhir program kita.
Salam sehat untuk semua dan semoga tetap penuh semangat.
Kita telah tiba di akhir dari Program Advokasi HKSR, yang berawal di tahun 2014 melalui Penelitian mengenai Kehamilan Tidak Diinginkan. Kita berkembang sedemikian rupa, baik dalam konsep, implementasi dan perluasan jaringan untuk advokasi maupun memperkuat pengetahuan dan kesadaran kita semua.
Oleh karenanya di semester ini, kita fokus ke kegiatan kolektif bersama mitra MAMPU lainnya maupun LSM dan aktivis di sekitar kita, untuk Advokasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Perkawinan usia Anak dan Dini, maupun Penguatan Ekonomi Perempuan.
Diawali dengan kegiatan kolektif Forum Perempuan Muda di semua wilayah untuk merayakan Hari Anti Kekerasan Seksual di tanggal 14 Februari dan Peringatan Hari Perempuan Sedunia oleh FKPAR. Tulisan di newsletter ini menceritakan bagaimana suasana kampanye gerakan perempuan akar rumput di 8 provinsi dalam merayakannya.
Hingga tiba-tiba wabah Covid-19 betul-betul masuk ke Indonesia melalui terinfeksinya satu perempuan di Jakarta. Kegiatan kita sejenak melambat, sambil berpikir apa yang perlu dilakukan. Apalagi akhir program mendekat, kegiatan masih banyak yang perlu dilakukan. Oleh karenanya Permampu sepakat membangun Rencana Pendidikan Kritis untuk Perempuan Akar Rumput di semua wilayah. Kegiatan ini terlaksana sebagaimana yang dapat dilihat dalam tulisan mengenai FKPAR dan FMS. Sebuah kesempatan mengingatkan kembali betapa pentingnya hidup bersih dan sehat, trampil membuat disinfektan dan *hand sanitizer*; serta patuh ke aturan/protokol kesehatan. Tindak lanjutnya bahkan diintegrasikan ke OSS&L yang merupakan inovasi kita untuk mendekatkan perempuan ke layanan kesehatan yang komprehensif.
Sementara itu berbagai kegiatan disesuaikan, dan konsep untuk Perempuan Muda juga disusun; sehingga wabah tidak menghentikan semangat kita untuk terus bergerak mengadvokasi HKSR Perempuan. Modul yang berasal dari pengalaman kita, juga ditulis oleh Tim Permampu, yang saat ini sedang masa lay out.
Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, patuh ke protokol kesehatan, dan terus bergerak di lapang. Terimakasih.

Salam solidaritas.
Dina Lumbantobing.
Koordinator Pelaksana Permampu.

DAFTAR ISI

1. Editorial
2. Salam Redaksi
3. Akuntabilitas
4. OCPAT Permampu
5. Permampu dan Inklusi Disabilitas
6. FKPAR
7. FMS
8. Femokrat
9. FPM
10. Cerita Perubahan

Kementerian PPN/ Bappenas
Australian Government
MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Konsorsium PERMAMPU

LAPORAN POSISI DANA PERMAMPU PER JUNI 2020

Semester 1 tahun 2020, merupakan masa perpanjangan program MAMPU dengan fokus pada agenda aksi kolektif. Adapun aksi kolektif yang akan dilakukan bersama Mitra MAMPU adalah mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Penghapusan Perkawinan Anak & Usia Dini, dan Penguatan Ekonomi. Untuk pelaksanaannya, dana program yang masuk tahun 2020 sebesar Rp 1.037.774.613,- sementara Dana Management Overhead (MO) per Mei 2020 sebesar Rp 90.919.480,83.
Tetapi wabah Covid -19 telah mengakibatkan perubahan bentuk maupun kecepatan pelaksanaan kegiatan. Dari pelibatan banyak orang menjadi kegiatan yang menghindari kerumunan, lebih bersifat virtual dan dokumentasi pembelajaran. Hal ini direspons cepat baik oleh Permampu maupun MAMPU, dimana peluang realokasi yang diberikan MAMPU membuat PERMAMPU lebih leluasa mengelola dana yang ada. Dana tersebut telah mampu diserap dalam semester pertama, sebagaimana dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 1. Serapan Dana Anggota PERMAMPU per Juni 2020

Lembaga	Budget	Realisasi	Saldo	%
Flower Aceh	820.544.375	764.053.413	56.490.962	93,12
PESADA SUMUT	1.087.971.792	1.014.432.292	73.539.500	93,24
PPSW Sumatera	698.978.500	677.706.900	21.271.600	96,96
LP2M Sumbar	638.045.799	587.117.768	50.928.031	92,02
APM Jambi	673.350.450	611.410.228	61.940.222	90,80
CP WCC Bengkulu	772.382.467	713.777.367	58.605.100	92,41
WCC Palembang	561.679.650	522.148.690	39.530.960	92,96
DAMAR Lampung	703.380.766	717.143.412	(13.762.646)	101,96
Host	3.190.708.303	2.630.698.749	560.009.554	82,45
	9.147.042.102	**8.238.488.819**	**908.553.283**	**90,07**

Sementara itu sebagai konsekuensi logis dari penyerapan dana, posisi Managament Overhead (MO juga baik, sebagai mana dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 2. Management Overhead per Mei 2020

Lembaga	Budget	Realisasi	Saldo	%
Flower	126.927.624	115.363.941	11.563.683	90,89
Pesada	164.932.217	153.358.691	11.573.526	92,98
PPSW	114.172.541	109.457.085	4.715.456	95,87
LP2M	97.069.338	88.605.957	8.463.381	91,28
APM	103.627.485	95.191.357	8.436.128	91,86
CP WCC	108.420.028	103.667.845	4.752.183	95,62
WCC Palembang	91.684.733	81.083.861	10.600.872	88,44
DAMAR	98.236.336	97.797.210	439.125	99,55
Host	442.788.597	364.972.403	77.816.194	82,43
	1.347.858.898	**1.209.498.349**	**138.360.548**	**89,73**

Dengan demikian, pencapaian rencana kerja PERMAMPU secara keseluruhan sudah mencapai 90,07%. Pencapaian terendah ada pada Host karena ada kegiatan besar yang belum terlaksana seperti Evaluasi Eksternal Pogram PERMAMPU yang baru akan dilakukan pada bulan Agustus 2020, sementara penyerapan dana tertinggi ada pada lembaga DAMAR.

CAPAIAN PROGRAM PER JUNI 2020

Dalam periode ini, Konsorsium Permampu telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Semester 1 tahun 2020.

Adapun indicator capaian untuk semester ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Jumlah	Jumlah Anggota	
		Perempuan	Laki-laki
1. Jumlah Kelompok Ekonomi			
• Jumlah Kelompok	669		
• Jumlah Anggota	25.836		
• Jumlah Saham	63.136.724.685		
• Jumlah Pinjaman Beredar	63.708.917.882		
2. Jumlah perempuan muda yang aktif dan dilatih	23 kabupaten	1.492	50
3. Jumlah pembatra yang terlibat dalam program	4 kabupaten	69	
4. Anggota dan Pengurus FMS yang aktif	4 kabupaten	38	10
5. Jumlah Kelompok Kepentingan Yang Terlibat dalam Program	26 kabupaten	4.256	570
6. Jumlah Femokrat	16 kabupaten	139	
7. Jumlah perempuan korban KTP yang ditangani langsung	11 kabupaten	96	
8. Jumlah perempuan yang difasilitasi mengakses layanan kesehatan	21 kabupaten/kota	1.425	
9. Jumlah aparatur Pemerintah terlibat dalam program tingkat desa hingga kabupaten/kota	16 kabupaten	302	168
10. Jumlah tokoh agama yang difasilitasi	8 kabupaten	31	39
11. Jumlah perempuan disabilitas yang dijangkau	5 kabupaten	42	5
12. Jumlah lansia yang dijangkau	10 kabupaten	1.448	1.448

Untuk periode ini, dilaksanakan Pendidikan Kritis Pencegahan Penyebaran Covid 19 kepada seluruh personil Anggota Konsorsium, kader inti, dan perwakilan forum-forum dampingan. Kemudian para personil dan kader utama yang dilatih melakukan diskusi kritis terkait Pencegahan Penyebaran Covid 19 di 21 kabupaten dengan total peserta yang dijangkau di triwulan ini sebanyak 5.706 orang (5.375 perempuan dan 331 laki-laki).

Karena pandemic Covid 19 masih mengkhawatirkan semua pihak dan aturan pemerintah untuk mengurangi aktifitas yang melibatkan banyak orang, maka di semester ini, aktifitas tatap muka di tingkat PERMAMPU tidak ada dilakukan, lebih mengandalkan aktifitas virtual.



Foto 1. Rapat Virtual Konsorsium PERMAMPU

Membedah PERMAMPU dengan OCPAT

PENDAHULUAN

Konsorsium PERMAMPU (Perempuan Sumatera Mampu) didirikan dengan tujuan untuk melakukan penguatan kepemimpinan perempuan akar rumput untuk penghapusan kemiskinan melalui perlindungan dan pemenuhan Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) perempuan khususnya di pedesaan dan miskin kota. Dalam melaksanakan program, PERMAMPU yang didukung oleh MAMPU melakukan asesmen untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas organisasi setiap dua tahun.

Pengkajian tingkat kapasitas organisasi PERMAMPU dilakukan menggunakan *Organizatinal Capacity Performance Assessment Tools* (OCPAT), sebuah alat *self-assessment,* yang dilaksanakan oleh YAPPIKA. Pengkajian ini dilakukan selama tiga hari pada tanggal 29-31 Januari 2020. Lokakarya ini dilaksanakan di Pekanbaru dengan PPSW Sumatera sebagai Host; yang diikuti oleh 14 orang peserta yang merepresentasikan perwakilan organisasi anggota, pengawas, pengurus dan manajemen lembaga host PERMAMPU (PESADA).

Proses pengkajian tingkat kapasitas organisasi ini dilakukan secara partisipatoris yang diawali dengan mengidentifikasi *milestone* perubahan yang dialami organisasi dalam 2 tahun terakhir. *Milestone* perubahan tersebut dikelompokkan sesuai dengan 6 komponen yang akan diukur. Kemudian diikuti dengan mengidentifikasi dan merefleksikan capaian kinerja organisasi di 6 subkomponen. Tahap selanjutnya pendalaman tingkat kapasitas organisasi di 5 komponen internal organisasi yaitu orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program dan keberlanjutan.

Elaborasi khusus juga dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam dua tahun terakhir. Pengukuran kali ini juga mendalami tingkat kapasitas mitra dalam membangun keberlanjutan di tingkat submitra dan komunitas, pemanfaatan data dalam advokasi kebijakan dan dampak keberhasilan advokasi (perubahan kebijakan) terhadap perubahan lingkungan sosial di akar rumput.

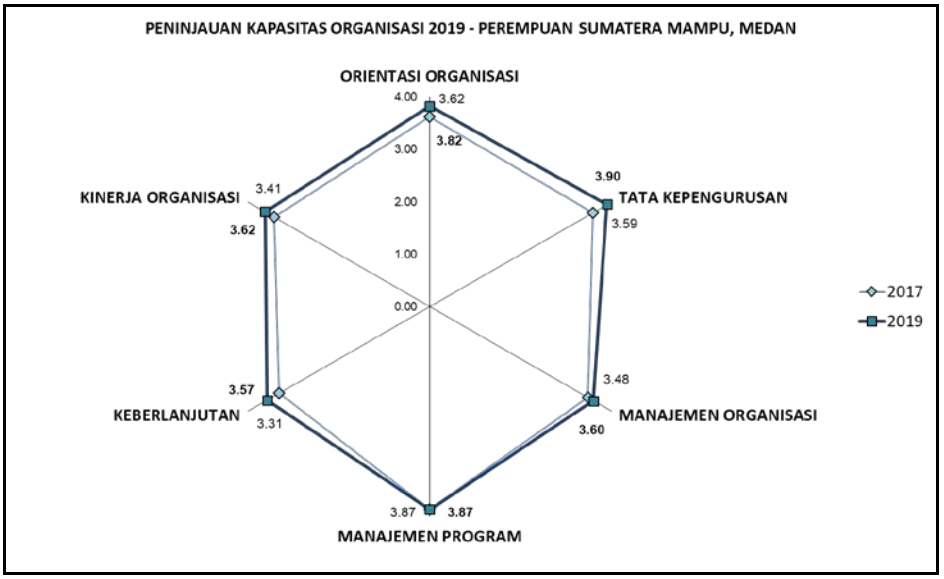
RINGKASAN HASIL

Assessment kapasitas lembaga dengan Organizational Capacity and Performance Assessment Tool (OCPAT) terdiri dari 6 komponen penilaian, yaitu (1) Orientasi Organisasi, (2) Tata Kepengurusan, (3) Manajemen Organisasi, (4) Manajemen Program, (5) Keberlanjutan, dan (6) Kinerja dimana masing-masing komponen memiliki beberapa subkomponen. Kondisi organisasi setiap komponen dinilai oleh peserta sendiri dengan skor 1 sampai dengan 4.

Hasil penilaian dikategorisasikan dengan menggunakan skala sebagai berikut:

- 1,00 – 1,75 : Buruk
- 1,76 – 2,50 : Kurang
- 2,51 – 3,25 : Cukup
- 3,26 – 4,00 : Baik

Hasil perolehan skor dan penjelasan kondisi di masing-masing komponen maupun subkomponen merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak untuk diperbandingkan dengan hasil dari lembaga lainnya.



Grafik 1: Skor Tingkat Kapasitas Organisasi di Seluruh Komponen

Perkembangan kinerja PERMAMPU dari aspek pemberdayaan masyarakat terlihat dari meningkatnya kemampuan kader dan meluasnya penguatan ekonomi kelompok perempuan hingga menjangkau 582 kelompok, dengan jumlah 27.545 perempuan sebagai anggota. Saham yang dimiliki oleh CU telah mencapai Rp 53.078.213.548 atau terjadi peningkatan sebanyak 58% dibanding 2 tahun lalu (Rp. 31 M) dengan besar pinjaman yang beredar sebesar Rp 56.986.916.410.

Selain itu ada sebanyak 713 perempuan potensial yang telah diperkuat untuk menjadi pemimpin perempuan. Konsistensi PERMAMPU dalam melaksanakan PRIME-L, yaitu alat monitoring yang dikembangkan PERMAMPU sendiri dan dilaksanakan setiap tahun; mampu memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat.

Program MAMPU juga memperkuat jaringan kerja OMS di wilayah kerja PERMAMPU untuk isu disabilitas, kebencanaan, lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan, kepemimpinan politik perempuan, demokrasi/pemilu bersih, serta resolusi konflik di Aceh yang membuahkan hasil berupa 28 kebijakan dari tingkat desa hingga provinsi.

Konteks pemerintah yang sedang fokus pada isu stunting direspon oleh PERMAMPU dengan memasukkan pemikiran feminis pada isu gizi serta melakukan penelitian untuk melacak akar persoalan stunting dengan perspektif feminis. Pergeseran wacana dan perspektif pun mulai nampak. Femokrat (Feminis Birokrat) makin menyadari peran dan target perubahan kebijakan, tokoh agama/adat sudah menjadi aktor perubahan dan terlibat dalam kampanye, pemerintah daerah sudah menerima HKSR sebagai kesatuan konsep yang integral.

Praktik PRIME-L membantu lembaga anggota merefleksikan implementasi visi misi dalam berbagai program kerja serta merefleksikan perubahan yang terjadi di tingkat individu, internal lembaga, kontribusi terhadap lingkungan sosial serta pemerintah daerah. Isu-isu strategis organisasi yang menguat dalam dua tahun ini adalah isu stunting dan gizi, kekerasan seksual, kepemimpinan perempuan, pencegahan perkawinan anak, serta SDG's. Meskipun rumusan nilai-nilai organisasi tidak mengalami perubahan, namun pendalaman makna serta praktik implementasi nilai makin menguat.

Di tingkat konsorsium, strategi PRIME-L digunakan untuk memastikan bahwa setiap lembaga anggota telah mempunyai pedoman perilaku dan nilai-nilai organisasi. Peran PERMAMPU yang menguat dalam dua 4 tahun terakhir adalah sebagai *capacity builder*, penyedia data bagi pemerintah daerah, stakeholder lain, dan masyarakat.

Perkembangan penting pada Komponen Tata Kepengurusan adalah efektifnya implementasi peran pengawas, pengurus dan koordinator. Juga terdapat keseimbangan antara pelaksanaan garis instruksi dengan partisipasi anggota. Koordinator mampu memastikan berjalannya tanggung jawab tanpa mencederai partisipasi. Jajaran kepengurusan juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan partisipasi FKPAR. Pada dua tahun terakhir juga ada peningkatan signifikan dalam pengambilan keputusan organisasi. Pengambilan keputusan organisasi melalui rapat-rapat anggota dilakukan secara lebih efektif, efisien dengan memanfaatkan kegiatan program dan teknologi organisasi. Pembentukan sub-sub group (tim kecil) mampu mempercepat pembuatan keputusan di tingkat konsorsium. Pengambilan keputusan melalui WA Group adalah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Sementara publik dan komunitas dapat mengkritisi secara langsung PERMAMPU melalui Forum Pertanggungjawaban Publik. Selain itu, ada perubahan dalam pelaksanaan PRIMEL, jika sebelumnya dilakukan oleh masing-masing organisasi anggota, dalam tahun terakhir dilaksanakan di tingkat konsorsium.

Perkembangan PERMAMPU di Komponen Manajemen Organisasi terjadi di semua sub-komponen. Dalam Manajemen SDM, perkembangan paling menonjol terlihat pada menguatnya kapasitas staf tentang pendidikan politik untuk perempuan, isu kekerasan seksual, advokasi kebijakan isu stunting, dan SDGs. Menguatnya kapasitas staf tersebut mampu melahirkan ahli-ahli muda baru baik perempuan maupun laki-laki, diangkatnya anggota FKPAR sebagai pejabat publik di tingkat desa hingga kabupaten serta penyelengara pemilu, terpilihnya perempuan potensial menjadi caleg dan aleg, meningkatnya permintaan pada lembaga anggota konsorsium dan komunitas untuk menjadi fasilitator dan narasumber dari tingkat daerah hingga internasional, serta peningkatan peran forum perempuan muda. Dalam dua tahun ini kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan distribusi data meningkat, sehingga berkontribusi pada makin cepatnya respon lembaga, data semakin akurat dan mudah diklarifikasi.

Terkait dengan manajemen keuangan, konsistensi penerapan mekanisme serta menguatnya pemahaman pimpinan lembaga atas laporan keuangan berkontribusi pada makin kecilnya temuan kesalahan di tingkat lembaga anggota konsorsium. PERMAMPU lebih terbuka dan cepat merespon konflik internal melalui pendekatan individu, rapat anggota, WAG, serta layanan pengaduan publik melalui website. Pedoman perilaku beserta pedoman penegakan perilaku telah diadopsi oleh masing-masing lembaga anggota konsorsium.

Perubahan penting dalam Komponen Manajemen Program ini antara lain adanya perubahan instrumen monev dari PIA (Participatory Internal Audit) menjadi PRIMEL (Participatory Integrated Monitoring, Evaluation & Learning), dimana perubahan ini merupakan integrasi antara instrumen Fiduciary dengan IDF. Secara teknis pelaksanaan kegiatan PRIMEL juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya dilaksanakan oleh masing-masing organisasi anggota, dalam tahun ini PRIMEL dilaksanakan oleh konsorsium.

Di tingkat pelaksanaan program, PERMAMPU juga mampu menunjukkan perkembangan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan OSS&L di 8 (delapan) provinsi dengan jumlah piloting di 19 Puskesmas. Pelaksanaan OSS&L ini sangat berhasil sehingga beberapa Pemda meminta dilakukan replikasi.

Di akhir OCPAT, dihasilkan rekomendasi prioritas untuk ditindaklanjuti sbb.:

REKOMENDASI PRIORITAS

KOMPONEN	REKOMENDASI	KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS YANG DIBUTUHKAN
ORIENTASI ORGANISASI	1. Sharing kapasitas antar organisasi anggota PERMAMPU karena adanya beragam karakteristik organisasi	
	2. Memperkuat advokasi ke pemerintah tentang penanganan kasus atau layanan bagi korban/penyintas	
	3. Merumuskan bentuk-bentuk strategi pelibatan dan partisipasi kelompok disabilitas	3.1 Pelatihan Inklusi Disabilitas untuk personil lembaga & Kader 3.2 Pelatihan Penanganan awal dan pendampingan disabilitas netra, daksa& rungu. 3.3 Pendataan disabilitas "*Washington Gruop Question* " 3.4 Pelatihan Pengembangan Strategi Media Publikasi yang ramah dengan Kelompok Disabilitas
	4. Menjaga konsistensi praktik RAT di tingkat komunitas	4.1 Membuat panduan pelaksanaan RAT 4.2 Belajar RAT sistem online
	5. Lembaga memainkan peran lebih aktif dalam isu HKSR dalam jaringan	5.1 Memperkuat sinergisitas dengan jaringan, serta leading aksi kolektif untuk advokasi terkait isu HKSR 5.2 Pelatihan Pengembangan Strategi Media Publikasi khusus isu HKSR
TATA KEPENGURUSAN	1. Menyempurnakan definisi dalam pedoman perilaku, untuk tujuan pengintegrasian akuntabilitas publik dengan personal integrity dalam perilaku sehari-hari.	
	2. Mengembangkan mekanisme penegakan pedoman perilaku	2.1 Mereview SOP pelaksanaan pedoman prilaku lembaga 2.2 Menyusun SOP penegakan pedoman perilaku lembaga & Konsorsium 2.3 Review dan integrasi dalam rapat-rapat rutin
MANAJEMEN ORGANISASI	1. Menggunakan software SANGO di tingkat organisasi anggota PERMAMPU	1.1 Pelatihan SANGO untuk staf keuangan Permampu 1.2 Pembelian dan asistensi penggunaan software SANGO
	2. Memperjelas (menanyakan/mengkonfirmasi) perihal penggunaan bunga bank untuk pembiayaan audit lembaga	2.1 Dukungan penggunaan bunga bank untuk pembiayaan audit DAMAR
MANAJEMEN PROGRAM	1. Pengolahan data program menjadi publikasi menarik dan bahan advokasi.	1.1 Menyusun infosheet informasi dan edukasi dari data program untuk dipublish di media sosial lembaga 1.2 Memodifikasi hasil pelatihan pengelolaan data 1.3 Membuat klasifikasi data 1.4 Pembuatan panduan & format *knowledge management.* 1.5 Pengembangan Knowledge Management Lembaga
	2. Publikasi capaian PERMAMPU agar bisa menjadi rujukan atau bermanfaat bagi lembaga lainnya.	2.1 Publikasi cerita perubahan atau inovasi terkait keberhasilan program yang dijalankan oleh Permampu yang dikemas dalam bentuk infosheet atau video menarik kepada dampingan, jaringan dan melalui media sosial Permampu.

KOMPONEN	REKOMENDASI	KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS YANG DIBUTUHKAN
		2.2 Update FB, website Permampu dan Anggota setiap minggunya. 2.3 Sosialisasi alamat website Permampu dalam setiap kegiatan (diskusi kritis di kelompok dampingan dan mitra kerja).
KEBERLAN JUTAN	1. Perlu menajamkan strategi jangka pendek seperti pembuatan proposal baru, kerja sama dengan pemda, pemerintah desa, swasta (CSR). 2. Menggunakan *virtual meeting* untuk menekan biaya operasional. 3. Menginisiasi kegiatan ekspose kerja-kerja ke sektor swasta.	2.1 Rapat Anggota Permampu melalui WAG/ Zoom/Hangout. 3.1 Pemetaan sector swasta di wilayah program 3.2 Identifikasi CSR & pengusaha potensial & membangun hubungan dengan mereka 3.3 Membangun strategi membangun hubungan dengan pihak perusahaan 3.4 Inisiasi pertemuan dengan jaringan swasta filantropi dan forum CSR.
KINERJA	1. Memperkuat konsep keberlanjutan di tingkat masyarakat 2. Melakukan analisa *cost and benefit*	1.1 Meningkatkan komitmen membangun CU dan kewirausahaan sosial, & advokasi dana desa/nagari 1.2 Membangun diskusi peta jalan arah CU & lembaga pendamping ke depan. 1.3 Membangun rasa memiliki setiap kelompok/ koperasi kepada lembaga pendamping. 2.1 Peningkatan pemahaman tentang analisa cost and benefit.

Hingga saat ini, paling tidak Tata Kepengurusan, Manajemen Organisasi dan Program serta Keberlanjutan telah mulai dilaksanakan. Di bawah ini adalah gambar para peserta dan fasilitator dengan latar belakang hasil-hasil diskusi.



Foto 1. Peserta OCPAT bersama Fasilitator dan Panitia

PERMAMPU dan Issu Inklusi Disabilitas

PELATIHAN INKLUSI DISABILITAS UNTUK STAF FLOWER ACEH
Oleh : Fasilitator Kota Banda Aceh, Fatimah Zuhra

Komitmen pengakuan dan pemenuhan hak-hak disabilitas juga diwujudkan oleh Flower Aceh melalui partisipasi aktif dalam kerja-kerja kemitraan dan jaringan advokasi pemenuhan hak-hak disabilitas di Aceh sejak awal tahun 2018. Staf sebagai ujung tombak untuk implementasi program kerja lembaga yang inklusif mendapatkan penguatan kapasitas dan peningkatan kepekaan terkait isu disabilitas melalui pelatihan inklusi disabilitas untuk staf Flower Aceh pada 11 Juni 2020 di Meeting Room Ivory, Banda Aceh. Proses pelatihan yang diselenggarakan di tengah pandemi ini berlangsung lancar dengan mengacu pada protokol kesehatan dan pencegahan Covid19.
Pelatihan difasilitasi oleh 2 lembaga ternama di Aceh yang fokus pada isu disabilitas, yaitu Natural Aceh dan Puan Addisa; berlangsung selama satu hari. Pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan staf terkait inklusi disabilitas, ragam penyandang disabilitas dan hak-haknya dalam perspektif Kebijakan, faktor penghambat dan pendukung dalam inklusi, strategi pelibatan multipihak strategis tentang inklusi disabilitas untuk menciptakan lingkungan inklusif, memfasilitasi perubahan perilaku di komunitas untuk menciptakan lingkungan inklusif, serta memperkuat dukungan setiap orang kepada penyandang disabilitas.



Foto Proses Kegiatan Pelatihan Inklusi Disabilitas untuk Staf Flower Aceh

Damar Perempuan Lampung
Penguatan Perspektif Gender dan Disabilitas dalam Pemenuhan HKSR dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan secara Inklusif.



Aksi kolektif DAMAR bersama Konsorsium Permampu melalui penyelenggaraan *Training for Handling Disability* dalam rangka penguatan perspektif gender dan Disabilitas dalam Pemenuhan HKSR dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan secara Inklusif diikuti oleh Dewan Pengurus Perkumpulan dan staf Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, serta Guru Kader Gerakan Perempuan Lampung. Kegiatan ini diselenggarakan pada kamis 18 Juni 2020 di Aula Fakultas Ilmu sosial Politik Universitas Lampung dengan melibatkan narasumber dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lampung, Bappeda Propinsi Lampung, dan Dinas Sosial Propinsi Lampung.

Training ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan perspektif tentang Disabilitas, Gender dan Kesehatan Reproduksi secara inklusi. Memetakan persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan kerentanan menjadi korban kekerasan, meningkatkan pengetahuan

personil DAMAR mengenai program Pemerintah Propinsi Lampung dalam menjamin Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Serta Meningkatkan Keterampilan Peserta dalam memberikan informasi kepada kelompok dampingan dan stakeholder lainnya tentang perempuan dengan issu-issu Disabilitas.

Hasil berbagi pengalaman yang disampaikan ketua HWDI terpetakan Hambatan-hambatan Perempuan Disabilitas, yakni:

- Lemah dihadapan hukum maupun sistem peradilan
- Rentan terhadap penyakit/infeksi akibat terbatasnya akses terhadap perawatan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi
- Jarang/tidak dimintai persetujuan pada hal-hal yang menentukan maupun perlakuan terhadap dirinya
- Terdiskriminasi didalam keluarga (tidak adanya kesamaan kesempatan)
- Tertinggal dalam menyerap informasi dikarenakan alat komunikasi yang tidak terformat dalam bahasa yang dapat diakses oleh berbagai jenis keterbatasan
- Tidak mendapat kesempatan pertama dalam meningkatkan kapasitasnya
- mengalami diskriminasi berlapis
- Dianggap aseksual
- Tidak merasa cantik karena ketidak sempurnaan tubuh
- Pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan seksual yang terbatas yang mengakibatkan timbulnya pelecehan
- Menjadi objek potensial pelecehan karena keterbatasan dalam fisik, intelektual, sensorik maupun mental
- Bagi yang mempunyai disabilitas genetik, haknya atas berkeluarga dan mempunyai keturunan dibatasi.

Sedangkan secara khusus terkait permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan Disabilitas masih kuat stigma bahwa perempuan disabilitas aseksual (frigid, tidak mempunyai hasrat seksual, mandul, dll), yang berakibat:

1. Kurangnya upaya pengajaran / informasi Kesehatan reproduksi dan seksualitas yang bermanfaat untuk menghindarkan/mencegah mereka dari tindakan kekerasan seksual
2. Sikap ketidak setaraan perlakuan antar sesama perempuan, dimana perempuan disabilitas dianggap tidak mempunyai hak memutuskan untuk dirinya sendiri, seperti tindakan pemasangan kontrasepsi paksa, tanpa persetujuan yang bersangkutan atau tanpa penyampaian informasi/penjelasan kepada yang bersangkutan. Keputusan ada di tangan orangtua/wali/kepala panti (jika bertempat tinggal di panti).

Rekomendasi Perlindungan Hukum Terkait kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan disabilitas :

a. Perlu adanya pengaturan yang bertujuan untuk melindungi perempuan disabilitas sebagai korban tanpa mengurangi penindakan terhadap pelakunya.
b. Pendekatan perlindungan korban harus setara antara korban anak perempuan dan anak perempuan disabilitas. Pihak yang mengatasnamakan termasuk orang tua korban tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, jika mengijinkan kontrasepsi paksa kepada anaknya, termasuk anak/keluarga dengan disabilitas mental atau intelektual. Tanggungjawab orang tua terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual terjadi pada semua kasus, tidak hanya pada anak disabilitas mental.
c. Penegak hukum harus mengupayakan support system dan perlakuan lebih seperti penambahan masa hukuman dari standar masa hukuman kejahatan kepada perempuan non-disabilitas. Hal ini karena masih ada korban disabilitas mental/intelektual yang tidak dapat memberikan keterangan terkait dengan kekerasan seksual yang dialaminya sehingga menyulitkan penangkapan dan penghukuman pelaku serta kondisi kerentanan korban dapat mengalami kekerasan seksual.
d. Pemerintah harus menyediakan perlindungan serta support system tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada orangtua/wali korban, mulai dari masa pengobatan sampai dengan masa pemulihan. Keluarga adalah salah satu korban dari dampak kekerasan berbeban ganda baik secara material maupun stigma Upaya pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, terutama penyandang disabilitas mental dan intelektual, tidak boleh menjadi beban tunggal dari keluarga atau orangtua, sehingga solusi yang harus dikemukakan adalah memunculkan peran Pemerintah yang wajib ikut bertanggungjawab dalam pemulihan korban kekerasan seksual.

FORUM KOMUNITAS PEREMPUAN AKAR RUMPUT (FKPAR)



FKPAR Provinsi Aceh

Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR), Pengelola One Stop Service and Learning (OSS&L), serta perwakilan aparatur desa dan tokoh adat-tokoh agama di Kabupaten/Kota Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara terlibat aktif dalam ToT Pendidikan Kritis Pencegahan Covid19 yang diselenggarakan oleh Flower Aceh-Permampu pada 7-12 April 2020. Pelaksanannya mengacu pada protokol kesehatan dan pencegahan Covid19, di mana jumlah peserta dibatasi kurang dari 10 orang, tersedia tempat cuci tangan ataupun *hand sanitizer*, dilakukan pengecekan suhu tubuh, menggunakan ruang yang luas dengan jarak duduk minimal 1.5 meter, jaga jarak dan menggunakan masker selama kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan ini para pihak yang terlibat dapat meneruskan kembali informasi yang didapatkan kepada keluarga, orang terdekat dan komunitasnya melalui pertemuan-pertemuan di desa dan peran strategisnya. Sehingga memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penaganan Covid19.

Di tengah Pandemi Covid19, FKPAR tetap terlibat aktif dalam diskusi kritis yang dilaksanakan secara rutin tiap bulannya dengan menggunakan protokol kesehatan dan pencegahan Covid19 di 16 desa Kabupaten/Kota Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara. Pertemuan membahas tentang isu-isu seputar Covid19 dan upaya penanganannya, pemenuhan Kesehatan Seksual dan Reproduksi, pengapusan kasus perkawinan anak, akses layanan kesehatan selama pandemi bagi remaja, pemenuhan hak pekerja, persiapan perempuan menuju *new normal*, pentingnya asupan gizi keluarga, juga jenis - jenis bantuan sosial pemerintah dampak Covid19. Selain itu juga dibahas tentang startegi membangun ketahanan pangan dengan pemanfaatan pekarangan rumah, penguatan ekonomi rumah tangga perempuan, dan pengembangan Credit Union. Lebih lanjut pengurus dan anggota FKPAR juga dipercaya menjadi narasumber dan penyuluh tentang pencegahan dan penangana Covid19 bersama multipihak di dingkat desa dan Gugus Tugas Covid19 di tingkat kecamatan.





Foto Diskusi Kritis KPM/CU Bungong Meah, Aceh Utara, 13 Juli 2020 Foto Diskusi Kritis KPM/CU, esa Blang Oi, 15 Juni 2020 Bungong Kupula

Sementara itu peringatan Hari Perempuan Sedunia/ *International Women's Day* yang dikemas dengan aksi *Women March* Aceh 2020, FKPAR Aceh terlibat aktif pada aksi kampanye IWD 2020 yang diselenggarakan secara kolaboratif bersama Flower Aceh, *Millenial Empowerment*, Mitra MAMPU, Balai Syura, Forum Puspa Aceh, Natural Aceh, Komisi Kesetaraan KSBSI, *Youth Forum of Aceh* dan jaringan lainnya di Aceh pada 8 Maret 2020 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Aksi yang melibatkan puluhan orang dari lintas organisasi dan komunitas dimulai dengan *longmarch* mengelilingi lapangan Blang Padang dan membawa alat kampanye yang berisi himbauan untuk pemenuhan hak perempuan di Aceh.



Aksi ini merupakan kegiatan kolaboratif FKPAR bersama gerakan perempuan, kelompok millennial, berbagai lembaga dan komunitas serta individu di Aceh untuk menuntut pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh. Mengingat selama ini masih banyak permasalah perempuan yang belum tuntas, seperti angka kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi, partisipasi perempuan di ranah pendidikan dan politik yang masih lemah, akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang belum memadai, dan lainnya.



Aksi *longmarch* dilanjutkan dengan diskusi santai lintas organisasi/komunitas dan usia untuk berbagi informasi dan pengalaman melakukan upaya pemenuhan hak perempuan di Aceh. Momen diskusi ini menjadi ruang refleksi bersama mengenai kondisi pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh, sekaligus memperkuat konsolidasi gerakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh.

Diskusi yang dipandu oleh Fasilitator Banda Aceh, Devi Marleny juga dimeriahkan dengan penampiln *live music acustic* oleh Band Bangun Pagi dan komunitas *Breakdance* bernama *Nanggroe Break Cypherz* (NBC) yang mengiringi proses berlangsung.

Diskusi dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan peserta untuk pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh, *flash-mob* oleh seluruh peserta serta doa bersama.

7 Tuntutan Aksi Untuk Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh

Aksi diakhiri dengan pebacaan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan semua pihak di Aceh, yaitu:

1. Mendesak semua pihak untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman bagi perempuan bebas dari tindak diskriminatif dan kekerasan untuk berpartisipasi di ranah publik dan politik dalam pembangunan Aceh.
2. Mendorong semua pihak melakukan upaya nyata untuk pemenuhan hak perempuan terkait kesehatan dan gizi, pendidikan, ekonomi, politik, lingkungan, sosial dan budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3. Mengecam dan menolak segala bentuk diskriminasi, pelecehan, pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Aceh, serta tindakan *victim blaming* (menyalahkan korban terhadap bencana yang menimpa dirinya), intimidasi dan berbagai bentuk perbuatan yang dimaksudkan untuk membungkam suara penyintas.
4. Mendesak adanya upaya pemulihan dan pemenuhan hak perempuan pelanggaran HAM Aceh di masa konflik, serta hak perempuan korban kekerasan seksual melalui proses hukum yang adil dan bermartabat.
5. Mendesak negara segera menyelesaikan persoalan yang dialami perempuan terkait krisis air serta isu lingkungan lainnya di Aceh Besar dan wilayah lainnya di Aceh.
6. Mendesak negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender sesuai amanah dalam Undang-undang (UU) HAM No.39/1999, UU Penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan No.7 tahun 1984, UU Penghapusan KDRT No 23/2004; dan melindungi anak-anak sesuai UU No. 35/2014, termasuk mensosialisasikan revisi UU Perkawinan No.16/2019, mengenai usia minimum untuk kawin; dan mengawasi implementasinya di dalam masyarakat.
7. Mendesak negara menjalankan amanah CEDAW yang telah diundangkan pada undang-undang no.7/1984 pasal 2 yang mengharuskan Negara membuat peraturan-peraturan yang melindungi, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.

Aksi IWD tahun 2020 juga dirangkai dengan kegiatan Nonton Bareng Kita (NONGKI) film dokumenter pada sore harinya dengan menghadirkan narasumber pemantik yaitu Khairani Arifin dari Permampu, dr Tira dari Unicef dan Suraiya Kamaruzzaman dari Balai Syura.

FKPAR juga terlibat aktif pada dialog tokoh perempuan komunitas dengan pengambil kebijakan di Aceh pada 9 Maret 2020 di Hotel Ayani, Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPRA, Darwati A Gani dan Nora Idah Nita, Komisioner KKR Aceh, Ainal Mardiah serta Sekretaris DPPPA Aceh, Yuslita.

FKPAR Sumatera Utara

Dalam rangka Peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD), Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) melakukan aksi bersama jaringan tingkat Propinsi mitra MAMPU dengan melibatkan kader dan perempuan muda dampingan Pesada dari kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Medan & Langkat serta Nias. Rangkaian kegiatan Perayaan Hari Perempuan Internasional tahun 2020 dilaksanakan selama 2 hari.

Pada hari pertama tanggal 6 Maret 2020 bertempat di Aula BP- PAUDNI dilaksanakan Pendidikan mengenai HAM, HAP dan Analisis pasal-pasal utama RUU Ketahanan Keluarga. Pendidikan ini diikuti oleh 55 perempuan dari seluruh kabupaten dampingan PESADA

seperti tersebut di atas. Adapun tujuan kegiatan adalah paham mengenai Hak-hak Azasi Manusia dan Perempuan yang berhubungan dengan kedaulatannya di dalam rumah tangga/keluarga dan mengkritisi RUU Ketahanan Keluarga dan memahami point penting yang mendomestifikasi perempuan. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2020 merayakan IWD di Lapangan Merdeka Medan, bergabung dengan Aktivis dan Perempuan Akar Rumput lainnya (Perempuan untuk Negeri, Bitra, Yapidi, PEKKA, PSW/G&A Indonesia.Perempuan Pekerja Rumahan, IWD, Media, KKGTA UNIMED, dari seluruh SUMUT dengan jumlah peserta 178 orang (P: 168, Lk :10 orang).

IWD dirayakan dengan melakukan diskusi kritis dan kampanye publik untuk mengingat kembali Hak-hak Azasi Manusia dan Perempuan, serta mengkritisi RUU Ketahanan Keluarga yang cenderung memperkuat peran - peran yang mendomestikasi perempuan, mengatur dan mencampuri ruang privat keluarga. Anggota DPD Perempuan SUMUT terpilih 2019: Dr. Badikenita Sitepu, SE, M.Si. yang didukung oleh PESADA hadir member sambutan dan dukungan terhadap gerakan ini.

Capaian kedua dari kedua kegiatan di atas adalah peserta paham mengenai kedaulatan perempuan di dalam rumah tangga/keluarga, dan pentingnya bersatu dengan kelompok perempuan di SUMUT untuk mengkampanyekan Hak-hak Azasi Perempuan yang bebas dari segala bentuk diskriminasi berbasis gender ,sebagaimana diamanahkan oleh UU No.7 tahun 1984, Juga mendesak DPR RI mensahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di akhir acara seluruh Peserta sepakat mengeluarkan pernyataan sikap & beritanya dimuat dalam media metro online

Kegiatan ini diakhiri dengan aksi damai ke jalan di seputar lapangan Merdeka dan, setiap peserta mengkampanyekan dukungan untuk pengesahan RUU-PKS serta penolakan RUU Ketahanan Keluarga.





Pendidikan FKPAR dalam rangka perayaan IWD - Kegiatan Perayaan IWD bersama Jaringan

Berikut adalah statement yang diedarkan ketika pelaksanaan aksi kolektif tersebut.

Aksi Kolektif Perayaan IWD 2020 Perempuan SUMUT.
Statement Perempuan SUMUT

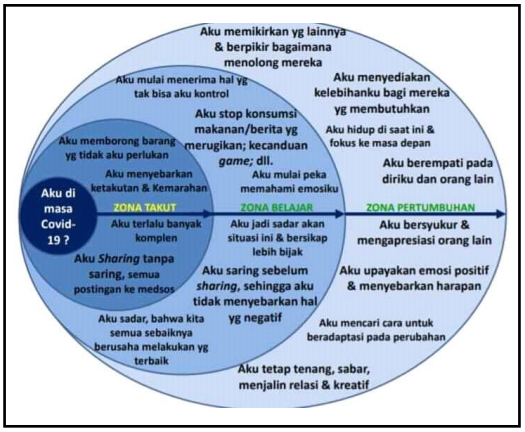
"Perempuan Berdaulat Atas Dirinya.
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual"
Dalam perayaan International Women's Day 2020 ini, kami perempuan SUMUT lintas organisasi dan kelompok perempuan akar rumput yang berjumlah 180an perempuan dan 10an laki-laki pendukung berkumpul bersama untuk melakukan pendalaman pengetahuan dan menguatkan kesadaran kami atas Hak-hak Azasi Manusia dan Perempuan.
Kami menyadari hak-hak kami sebagai perempuan untuk memutuskan untuk kawin atau tidak, mempunyai anak atau tidak, berkeluarga atau tidak, dan memutuskan bentuk keluarga kami. Semua itu adalah hak-hak pribadi kami yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh Negara.
Kami berhak untuk bekerja, berkiprah di luar rumah tangga, sesuai dengan kemampuan dan keinginan kami.
Kami berhak untuk menikmati privasi kami, menikmati hidup kami, dan kami bertanggung jawab penuh atas diri kami.
Kami adalah perempuan yang merupakan mahluk utuh, yang berhak memutuskan apa yang baik bagi diri kami.
Tubuh, pikiran dan jiwa kami adalah kesatuan yang utuh, yang tidak boleh dipilah-pilah dan dikontrol oleh siapapun.
Tetapi kami perlu mengingatkan Negara bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual terus meningkat sebagaimana telah berulang kali kami tunjukkan dalam data-data setiap tahunnya. Bahwa hak-hak perempuan petani, perempuan pekerja khususnya pekerja rumahan masih sering dilanggar bahkan diabaikan secara sistematis.
Untuk itu kami mendesak Negara agar menjalankan kewajibannya untuk melindungi kami perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi sebagai mana tercantum dalam UU HAM No.39/1999, UU Penghapusan Berbagai Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan No.7 tahun 1984, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23/2004; dan melindungi anak-anak kami sesuai UU No.35/2014.
Termasuk mensosialisasikan Revisi UU Perkawinan No.16/2019, mengenai usia minimum untuk kawin; mengawasi implementasinya di dalam masyarakat.
Kami mengingatkan Negara untuk menjalankan amanah CEDAW yang telah diundangkan di UU

No.7/1984 pasal 2 yang pada dasarnya mengharuskan Negara membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, keblasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
PEREMPUAN BERDAULAT,
KELUARGA BERDAULAT,
RAKYAT BERDAULAT
TOLAK RUU KETAHANAN KELUARGA,
SAHKAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.

Medan, 7 Maret 2020
Koordinator Pelaksana Perayaan IWD 2020
Dina Lumbantobing
Kontak : WA. 082164666615/Telp.081265557089

• *Aksi kolektif PESADA bersama: Perempuan untuk Negeri, Bitra, Yapidi, PEKKA, PSW/G&A Indonesia.*
#IWD2020#
#sahkanRUUPKS#
#perempuanakarrumputSumut#

Selain rangkaian kegiatan peringatan IWD, dilaksanakan pertemuan FKPAR di masing masing kabupaten dampingan Pesada, dimana kegiatan tersebut mengevaluasi Rencana Kerja tahun 2019, tantangan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi tantangan, serta menyusun RK untuk tahun 2020.
Dari pertemuan diperoleh informasi mengenai jumlah masyarakat yang mendapat bantuan, kriteria, jenis bantuan yang disalurkan dan upaya desa mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Kegiatan ini terlaksana di Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat & Humbang Hasundutan. Selain pemahaman di atas, dalam pertemuan FKPAR, memperoleh pemahaman seperti apa kondisi situasi Covid-19. Masing-masing mencoba mengenali dirinya dengan belajar menggunakan zona pertumbuhan berikut:



Diskusi sangat menarik dengan respons beragam yang intinya memotivasi FKPAR untuk mampu keluar dari ketakutan, kepanikan menuju ke zona belajar, bahkan bertumbuh.
FKPAR juga didorong melakukan pengawasan atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam pencegahan Covid-19 dan terlibat dalam MusrenbangDes/rapat desa, serta realokasi Dana Desa.
FKPAR juga terlibat dalam aksi respon cepat penanganan dan pencegahan Covid-19 bersama NGO lokal Kabupaten Dairi dengan melaksanakan aksi solidaritas melalui kegiatan bersama membagi selebaran, poster, masker & pernyataan sikap berupa masukan untuk pemerintah Kabupaten Dairi terkait dengan respon cepat penanganan & pencegahan Covid 19.
Untuk merespon bencana alam yang terjadi di dunia termasuk Indonesia, FKPAR juga melakukan pendidikan kritis mengenai pencegahan penularan dan penanganan Covid-19. FKPAR melalui kader terlibat langsung menjadi fasilitator diskusi dikelompok perempuan di desa-desa. Melalui diskusi bulanan mengajak perempuan untuk memahami Covid-19, gejala, pencegahan dan penanganan. Melalui media poster, flyer membagikannya serta menekankan agar tetap menerapkan protokoler kesehatan dengan sering mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan menggunakan masker pada saat keluar rumah serta terampil membuat disinfektan yang sesuai standar kesehatan.



Pendidikan Kritis FKPAR mengenai Covid-19

FKPAR Provinsi Riau

Artikel FKPAR propinsi Riau pada periode ini akan bercerita tentang "Pendidikan Kritis Bagi Kader FKPAR (Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput) dan FPM (Forum Perempuan Muda) Untuk Pencegahan dan Respon Cepat Penyebaran Covid-19". Propinsi Riau adalah salah satu propinsi yang terpapar pandemi Covid-19 seperti propinsi lain di Indonesia. Bulan Maret 2020 pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa pandemi covid-19 atau wabah virus corona sudah sampai di Indonesia dan beberapa orang sudah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 di Depok dan Jakarta. Adanya pengumuman ini membuat sebagian masyarakat

panic menghadapi wabah virus corona ini, tetapi sebagian masyarakat tidak peduli dengan wabah yang mematikan ini. Oleh karena itu Konsorsium Permampu menggagas pentingnya untuk memberikan pendidikan kritis pencegahan dan respon cepat tanggap pengangan Covid-19 ini di seluruh wilayah dampingan Permampu termasuk di Propinsi Riau.

Di Riau, Pendidikan dan diskusi kritis pencegahan dan respon cepat penyebaran Covid-19 ini telah diikuti oleh 738 orang peserta yang mewakili FKPAR, FPM, FMS sejak bulan April sampai Juni 2020. Pendidikan kritis pencegahan Covid-19 di Riau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan di 3 Kabupaten Kota (Kampar, Pekanbaru dan Rokan Hilir) serta Puskesmas yang ada di wilayah dampingan PPSW Sumatra. Pendidikan kritis diikuti oleh para kader FKPAR, FPM dan FMS, sedangkan diskusi kritis dilakukan di kelompok. Kader FKPAR yang merupakan kader OSS&L setelah mendapatkan pendidikan kritis pencegahan Covid ini wajib memberikan informasi ini kepada anggota kelompok dalam bentuk diskusi kritis. Para kader FKPAR, FMS, FPM dan anggota kelompok merasakan pendidikan dan diskusi kritis pencegahan dan respon cepat penanganan Covid-19 ini sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Covid-19, sehingga tidak mudah termakan Hoaks tentang Covid yang membuat masyarakat panik. Para kader FKPAR selain mendapatkan pendidikan kritis pencegahan dan penanganan Covid-19, peserta juga belajar membuat *Hand sanitizer* dan Desinfektan sederhana. Hal ini karena selama Pandemi Covid-19, kedua barang tersebut sulit didapatkan di apotek maupun toko obat, padahal kedua barang tersebut sangat diperlukan dalam pencegahan penularan Covid-19. Di bawah ini adalah bahan diskusi kritis FKAPR:

Bagaimana COVID-19 Menular?

COVID-19 adalah penyakit baru dan para peneliti masih mempelajari bagaimana cara penularannya. Dari berbagai penelitian, metode penyebaran utama penyakit ini diduga adalah melalui droplet/percik ludah, saluran pernapasan dan kontak dekat dengan penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang dapat mengandung virus penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu (biasanya 1 meter). Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Namun, masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut untuk mencegah penyebaran droplet.

Gejala Covid-19:

- Batuk dan Nyeri Tenggorokan
- Demam suhu tinggi / ada riwayat demam
- Sesak nafas

Gejala COVID-19 mulai dari seperti gejala flu biasa sampai kondisi berat seperti pneumonia (radang paru akut yang gejalanya sesak napas). Jika Anda mengalami gejala, memiliki riwayat perjalanan ke wilayah terjangkit, atau berpaparan dengan orang positif/kemungkinan COVID-19, maka Anda dihimbau untuk melakukan isolasi diri.

Melindungi Diri dari COVID-19

Ada beberapa hal yang dapat anda lakukan untuk mencegah atau membantu menghentikan penyebaran coronavirus, antara lain hal yang harus dilakukan:

- Tetap tinggal di rumah; bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah.
- Cuci tangan dengan sabun dan air minimal 20 detik atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60 %.
- Bersihkan dan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh.
- Tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu atau siku bagian dalam.
- Pakai masker jika anda harus beraktivitas di luar rumah dan ganti secara berkala.
- Terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga.

Hal yang **Tidak Boleh Dilakukan :**

- Bepergian ke luar rumah untuk hal yang tidak penting.
- Berada dekat dengan orang yang sedang sakit, batuk atau bersin.
- Menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan telapak tangan.
- Jangan Menimbun masker, hand sanitizer, atau perlengkapan medis lainnya.

Lakukan Hal Berikut Ini Jika Anda Mengalami Gejala Mirip COVID-19

- Kenakan masker (tipe masker bedah), dan ganti secara berkala, agar tidak menular ke orang lain.
- Lakukan isolasi mandiri, batasi menerima tamu di rumah, hindari kontak langsung dengan orang di sekitar Anda.
- Tetap tinggal di rumah jaga jarak dengan orang lain termasuk anggota keluarga.

- Minta bantuan teman, anggota keluarga, atau layanan jasa lain untuk menyelesaikan urusan di luar rumah.
- Lakukan ini semua selama 14 hari dan pantau gejala yang Anda alami setiap hari.

Selain melaksanakan pendidikan dan diskusi kritis pencegahan dan respon Covid-19 , FKPAR juga membuat dan membagikan masker kain kepada anggota kelompok dan masyarakat sekitar yang masih membutuhkan.
Semoga Pandemi Covid-19 segera berakhir dan kita dapat hidup sehat selamanya.



Pendidikan Kritis di Muara Fajar dengan melibatkan Puskesmas

FKPAR Propinsi Sumatera Barat

Dalam rangka Peringatan Hari Perempuan Internasional (*International Womens Day*/IWD) 2020 Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumatera Barat melakukan Aksi Bersama di tingkat provinsi dengan melibatkan CO perempuan dan perempuan muda dari tiga kabupaten/kota (Padang, Padang Pariaman, dan Tanah Datar). Aksi Bersama ini dilakukan selama 2 hari pada 7-8 Maret 2020 dengan Tema "Perempuan Berdaulat Atas Dirinya, Tolak Semua Aturan Diskriminatif". Aksi bersama dilakukan melalui Kegiatan Diskusi Kritis tentang RUU Ketahanan Keluarga, Omnibus Law (RUU Cipta Kerja), dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) serta Kegiatan Kampanye untuk mendukung pengesahan RUU-PKS dan menolak aturan diskriminatif.



Foto Suasana Kegiatan Diskusi Kritis "Perempuan Berdaulat Atas Dirinya, Tolak Semua Aturan Diskriminatif"

Kegiatan Diskusi Kritis dilaksanakan pada 7 Maret 2020 di Hotel Prima Syariah Kota Padang bersama tiga narasumber dari LBH tentang Omnibus Law, NPWCC tentang RUU-PKS, dan Akademisi Universitas Andalas tentang RUU Ketahanan Keluarga. Kegiatan Diskusi Kritis ini difasilitasi oleh Tanty Herida, Sekretaris Wilayah KPI Sumatera Barat dengan melibatkan 81 peserta (79P dan 2L). Melalui diskusi ini, perempuan diajak untuk memahami isi dari masing-masing RUU sekaligus dampak adanya RUU ini terhadap perempuan.
Kegiatan Kampanye dilakukan pada 8 Maret 2020 melalui Aksi Diam dalam Acara *Car Free Day* di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang. Sebanyak 100 orang anggota FKPAR Sumatera Barat dari LP2M, NPWCC, dan KPI terlibat dalam Kegiatan Aksi Bersama ini. Melalui kegiatan ini, FKPAR mengkampanyekan untuk mendukung RUU PKS dan menolak RUU Ketahanan Keluarga & Omnibus Law.





Foto Suasana Aksi Diam pada Kegiatan Car Free Day di Jalan Khatib Sulaiman

Dalam Kegiatan ini, setiap peserta mengkampanyekan dukungan terhadap pengesahan RUU-PKS, penolakan RUU Ketahanan Keluarga, dan penolakan RUU Omnibus Law dengan cara membawa media kampanye yang bisa dibaca oleh setiap pengunjung Car Free Day yang lewat. Selain bisa membaca tulisan dalam media kampanye, pengunjung juga diajak untuk memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan untuk menolak aturan diskriminatif. Kegiatan Aksi Bersama diakhiri dengan foto bersama dan penandatanganan komitmen bersama oleh semua peserta.





Foto Penandatanganan Komitmen Bersama (kiri) dan Foto Bersama (kanan) Kegiatan Aksi Bersama Hari Perempuan Internasional

Pada semester ini, FKPAR Sumatera Barat juga aktif dalam melakukan upaya pencegahan penularan dan penanganan Covid-19. Salah satu kegiatan yang FKPAR lakukan adalah pendidikan kritis kepada perempuan akar rumput dan masyarakat di 15 nagari/kelurahan. Melalui kegiatan ini FKPAR mengajak perempuan dan masyarakat memahami karakteristik Covid-19, gejalanya, serta cara pencegahan dan penanganannya. Pendidikan kritis ini dilakukan dengan menggunakan media flyer dan poster. Sebanyak 145 lembar poster dan 1.125 lembar *flyer* dibagikan kepada perempuan dan masyarakat di 15 nagari/kelurahan sebagai alat kampanye untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, FKPAR juga membagikan 1.320 masker dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Pemberian masker ini sejalan dengan himbauan pemerintah bahwa harus memakai masker setiap keluar rumah untuk melindungi diri kita dan orang lain dari Covid-19.

Selama masa pandemi Covid-19, FKPAR juga melakukan gerakan untuk membantu perempuan usaha kecil dengan mencarikan peluang usaha penerimaan pesanan pembuatan masker dari berbagai pihak. Gerakan ini dilakukan untuk membantu ekonomi anggota kelompok di saat pandemi Covid-19. Sejak Maret 2020, kelompok perempuan di Kab. Padang Pariaman telah menerima pesanan pembuatan masker sebanyak 1.600 masker, kelompok perempuan di Kota Padang sebanyak 500 masker dan kelompok perempuan di Kab. Tanah Datar sebanyak 3.000 masker.







Foto Anggota FKPAR sedang melakukan pendidikan kritis (kiri) dan membuat masker (kanan)

FKPAR Propinsi Jambi

Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput/FKPAR Jambi : Merayakan Hari Perempuan Internaasional / IWD tahun 2020

Pada tanggal 8 Maret tahun 2020 ini, bertempat di Hotel Swarnabhumi Kabupaten Bungo - Jambi, Aliansi Perempuan Merangin merayakan hari perempuan Internasional tahun 2020. Perayaan dilakukan dengan menggelar sebuah dialog publik dengan tema: "Perempuan Berdaulat atas dirinya, terbebas dari segala bentuk diskriminasi, Untuk Jambi Sehat secara Fisik, Psikis dan Sosial".

Peserta yang teribat dalam dialog publik ini berjumlah 70 orang: 54 orang perempuan dan 16

orang laki – laki. Mereka berasal dari unsur : Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput / FKPAR, Perempuan Pejabat Publik, FMS (Pemerintah, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Suami Peduli HKSR, Pembatra, dll), Perwakilan Forum Perempuan dan Lelaki Muda dampingan APM, dan Perwakilan Organisasi Perempuan dari Kabupaten Merangin, Bungo dan Sarolangun. Dialog publik yang menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan , Puspa dan Aliansi Perempuan Merangin ini memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Adanya ruang dialog untuk merefleksikan kembali peran – peran berbagai pihak dalam melakukan upaya mencegah perkawinan usia anak.
b. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran peserta bahwa masih ada kebijakan-kebijakan yang masih mendiskriminasikan Perempuan.
c. Menggalang kebersamaan untuk kekuatan kolektif dalam mengkampanyekan hak – hak perempuan dan pemenuhan serta penghormatan HKSR Perempuan
d. Meningkatkan pemahaman peserta tentang Hubungan antara perkawinan usia anak dengan Stunting

Tema " Perempuan berdaulat atas Dirinya, Tolak Aturan Diskriminatif" ini diangkat karena meski sudah cukup banyak Undang – Undang atau kebijakan yang muncul, namun masih tidak cukup ruang bagi perempuan untuk memperdengarkan suaranya. Hal ini dikarenakan Pengambilan keputusan belum banyak yang mengadopsi dari pengalaman perempuan itu sendiri. Saat ini sedang marak pembahasan RUU yang mendiskriminasikan perempuan seperti RUU Ketahanan Keluarga dan Omnibus Law ,yaitu aturan yang mengatur beberapa hal dalam satu Undang – Undang yang berpotensi mengurangi hak dasar pekerja(Gaji, Cuti, dsb). Sementara Pemerintah dan DPR seharusnya mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sangat mendesak.

Selain hal di atas, dari pengalaman lapang Aliansi Perempuan Merangin, ditemukan fakta bahwa ada keterkaitan antara Perkawinan usia anak dengan masalah Stunting; yang saat ini sedang dilakukan upaya penanganan dan pencegahan yang dilakukan oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia. Ditambah dengan persoalan kekerasan seksual yang dialami perempuan muda saat ini dikarenakan kurangnya atau bahkan minimnya pemahaman dan kesadaran mengenai seksualitas, serta otonomi perempuan muda terhadap tubuhnya. Pendidikan mengenai tubuh atau seksualitas tidak dilakukan dalam keluarga karena berbagai alasan dan latar belakang, sementara pendidikan di sekolah tidak menjawab masalah tersebut. Dengan IWD, APM berharap FKPAR akan terus menggaungkan penghapusan perkawinan usia anak, dan usia dini (<20).

FKPAR Provinsi Bengkulu

Forum Perempuan Akar Rumput Provinsi Bengkulu melakukan Dialog Publik tentang Bedah Rancangan UU Ketahanan Keluarga Serta PERDA Ketahanan Keluarga Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini dilakukan selama dua hari yaitu tanggal 17 & 18 Juni 2020 bertempat di Hotel Sinar Sport Kota Bengkulu, dengan jumlah orang terlibat sebanyak 76 orang (74 perempuan & 2 kali-laki) yang unsurnya adalah FKPAR Kota Bengkulu, Pupa dan dampingannya, KPI dan dampingannya, PKBI dan dampingannya, Aisyiyah dan dampingannya, FPKAR Kab. Rejang Lebong & FKPAR Kab. Seluma. Kegiatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan covid 19 yaitu dengan menggunakan masker, cek suhu tubuh, tersedianya tempat cuci tangan dll. Dalam kegiatan yang menjadi narasumber adalah:

- Hj.Wardaniar,S.Sos, MPd selaku Kabid PPKB, DP3APPKB Propinsi Bengkulu menyampaikan isi subtansi Perda Ketahanan Keluarga Propinsi Bengkulu.
- Dr. Nursulistyo B. Ambarini, S.H., M.Hum selaku akademisi, Fakultas Hukum UNIB memberikan informasi tentang bagaimana benang merah antara RUU Ketahanan Keluarga & Perda Ketahanan Keluarga.

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- FKPAR memahami tentang isi subtansi dari Rancangan undang-undang ketahanan keluarga dan Perda Ketahanan Keluarga.
- FKPAR memahami isi subtansi dari Rancangan Undang-Undang ketahanan keluarga yang ternyata isi di dalamnya mendomestikasi Perempuan, Bias Gender dan terlalu mengatur dalam urusan keluarga sehingga Rancangan Undang-Undang ini menjadi perdebatan dikalangan nasional maupun lokal.
- FKPAR mengetahui bahwasanya Perda Ketahanan Keluarga Provinsi sampai sekarang belum ada implementasi karena belum ada turunan Peraturan Gubernur sesuai mandat perda tersebut.
- Dari hasil bedah tersebut kemudian FKPAR menyuarakan aksi koletif mereka dengan menggunakan kalimat postif sebagai "Aksi Diam" tentang penolakan Rancangan undang-undang ketahan keluarga. Kata tersebut kemudian FKPAR publikasikan di media sosial masing-masing FKPAR.

FKPAR Sumatera Selatan

Pertemuan regular pengurus Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumsel yang berasal dari Kota Palembang, Kabupaten OKI, Muara Enim, dan Banyuasin pada semester I tahun 2020, dilaksanakan secara "offline" (luring=luar jaringan) tatap muka dan secara "online"/ virtual/dalam jaringan. Pertemuan secara tatap muka dilakukan pada tanggal 04 Februari 2020 sekaligus melaksanakan pertanggungjawaban publik FKPAR Sumsel. Pada saat bersamaan juga dilakukan laporan pertanggungjawaban public WCC Palembang bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang. Pengurus FKPAR Sumsel melaporkan kepada publik mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan serta membuat rencana tindak lanjut anggota FKPAR Sumsel tahun 2020.



Pengurus FKPAR Sumsel dan Personil WCC Palembang foto bersama setelah Laporan Pertanggungjawaban Publik.

Kegiatan FKPAR Sumatera Selatan tahun 2019 yang dapat dilaporkan di antaranya:

- Melakukan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di wilayah anggota FKPAR
- Bersama petugas puskesmas piloting menjadi petugas OSS&L dan penyuluh kesehatan di wilayah kerja puskesmas
- Bekerjasama dengan puskesmas di wilayah anggota FKPAR dalam melakukan tes IVA dan pemeriksaan kesehatan gratis
- Konsolidasi, evaluasi, dan penguatan FKPAR Sumatera Selatan melalui diskusi kritis reguler
- Melakukan pendidikan politik bagi anggota FKPAR Sumatera Selatan
- Mengkampanyekan pentingnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Pencegahan Perkawinan Anak dan Kepemimpinan Perempuan pada momen perayaan hari-hari gerakan perempuan
- Pengembangan pengelolaan CU (Credit Union) sebagai penguatan ekonomi anggota FKPAR Sumatera Selatan

Pertemuan/rapat rutin FKPAR Sumsel secara virtual dilakukan 2 kali pada periode ini, dengan menggunakan media whatshapp group FKPAR Sumsel pada tanggal 22 April 2020 dan Aplikasi Zoom pada tanggal 14 Mei 2020. Rapat ini adalah untuk sharing informasi dari masing-masing pengurus FKPAR Sumsel terkait pengetahuan masyarakat khususnya kelompok dampingan WCC Palembang tentang Covid-19, dampak, tantangan serta upaya yang dilakukan serta kesadaran masyarakat/anggota kelompok dampingan WCC Palembang untuk melindungi diri dari Virus Corona/Covid-19.

Pada semester I tahun 2020 ini juga, dalam rangka Perayaan Hari Perempuan Internasional, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumsel dan Forum Perempuan Muda Sumsel melakukan Kampanye Kolektif "Gerak Bersama Melawan Kekerasan dan Melawan Semua Aturan Diskriminatif- Perempuan Berdaulat Atas Dirinya". Rangkaian kegiatan berupa aksi simpatik : orasi dan penyebaran alat kampanye seperti leaflet, *info sheet*, stiker ke masyarakat/pengunjung di Seputaran Kambang Iwak Palembang. Setelah aksi, dilakukan bincang-bincang mengenai "Kedaulatan perempuan dan aturan yang diskriminatif serta Panggung Ekspresi Gerak Bersama : "Gerak bersama melawan" dengan musik, tarian, teater, puisi atau ekspresi seni lainnya, dan pembacaan pernyataan sikap bersama.



Kampanye kolektif ini bertujuan untuk :

1. Merangkul masyarakat untuk maju dan melakukan aksi untuk membantu menggerakkan keadilan bagi perempuan
2. Meningkatkan kesadaran serta membangun koneksi dan jaringan komunitas perempuan akar rumput dengan organisasi masyarakat sipil di Propinsi Sumatera Selatan terhadap pentingnya mendukung kedaulatan perempuan
3. Mendorong inisiatif semua pihak untuk melakukan perlawanan dan menolak kekerasan terhadap perempuan dan semua aturan yang diskriminatif

Target perayaan Hari Perempuan tahun 2020 ini adalah merangkul masyarakat agar maju dan melakukan aksi untuk membantu menggerakkan

keadilan bagi perempuan, meningkatkan kesadaran serta membangun koneksi dan jaringan komunitas perempuan akar rumput dengan organisasi masyarakat sipil di Propinsi Sumatera Selatan terhadap pentingnya mendukung kedaulatan perempuan, serta mendorong inisiatif semua pihak untuk melakukan perlawanan dan menolak kekerasan terhadap perempuan serta menolak semua aturan yang diskriminatif.

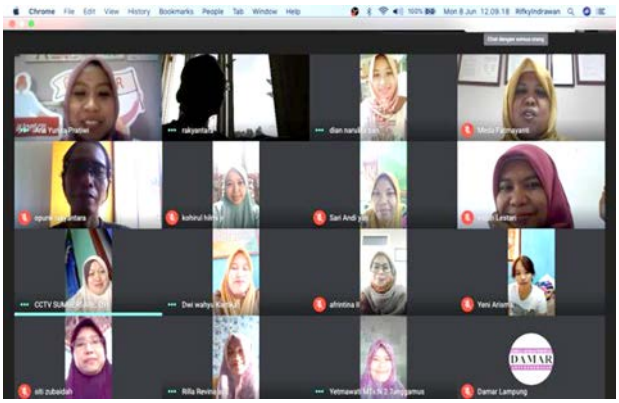


FKPAR Sumsel terlibat dalam acara bincang2 mengenai "Kedaulatan perempuan dan aturan yang diskriminatif serta Panggung Ekspresi Gerak Bersama di Hotel Swarna Dwipa Palembang
FKPAR Sumsel kemudian foto bersama setelah melakukan aksi simpatik : orasi dan penyebaran alat kampanye seperti leaflet, info sheet, stiker ke masyarakat/pengunjung di Seputaran Kambang Iwak Palembang.

FKPAR Propinsi Lampung

Kader Gerakan Perempuan Lampung mulai mengembangkan strategi pemasaran berbasis online

Dari proses pendampingan terhadap usaha-usaha yang sudah berjalan di FKPAR 6 kab/kota, teridentifikasi beberapa kebutuhan agar usaha yang dimiliki tetap terus berkembang, salah satunya strategi pemasaran, hingga akses teknologi digital.
Dari hasil refleksi yang dilakukan, salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian produk usaha kurang meluas adalah karena belum melakukan pemasaran online. Padahal saat ini penggunaan internet makin marak, memacu pergeseran cepat pola pemasaran di seluruh aspek industri usaha. Bahkan pemasaran menggunakan kekuatan internet, yang lebih popular disebut "e-Marketing" dirasa menjadi cara baru untuk pemasaran produk yang lebih strategis.
Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR terus memfasilitasi Pendidikan Strategi Pemasaran Berbasis Online Bagi Kader Gerakan Perempuan Lampung, untuk meningkatkan kapasitas mengenai platform jualan online, mengenal model bisnis dan analisa produk , membuat dan branding toko online yang kredibel, upload dan kelola produk jualan, taktik promosi produk, serta bagaimana seni melayani konsumen.



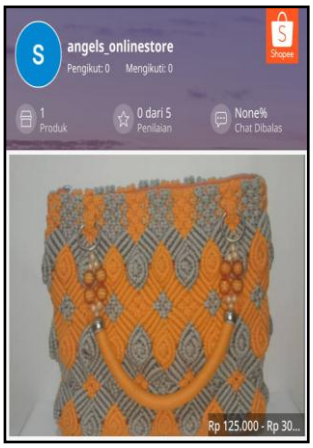
Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari secara virtual, dimulai tanggal 8, 17, dan 19 Juni 2020, melibatkan 18 anggota dan kader serikat perempuan dari 5 kab/kota (Bandarlampung, Lampung Selatan, lampung timur, Lampung Tengah, Tanggamus) yang memiliki produk usaha.

Usaha-usaha produktif perempuan yang dikembangkan forum komunitas perempuan akar rumput masih terbatas pada pemasaran offline, sementara pemasaran produk online dilakukan menggunakan media sosial yang dimiliki seperti face book, dan whatsapp story.

Identifikasi jenis usaha yang dilakukan FKPAR yang terlibat pendidikan:

Kota Bandarlampung - Pakaian dan alat-alat rumah tangga - Laundry - Sop buah, salad buah dan thai tea - Home set - Set kursi ecobrick	Kabupaten Lampung Tengah - Produk kecantikan wajah - Tiwul - Penjahit - Fashion
Kabupaten Lampung Timur - Kerajinan batik - Penjahit (fashion) - Sayuran	Kabupaten Lampung Selatan - Buah-buahan - Tas tali kur - Kue basah, - Etalase - Sayur matang dan ayam geprek
Kabupaten Tanggamus - Kue kering - Cambah/Toge - Pengolahan biji kopi - Keripik tempe dan kripik pisang	





Adapun marketplace yang dibuat perempuan akar rumput sebagai strategi pemasaran adalah:

- Adzka mart
- Bundafava
- Fatonahcake
- Ditas_homeset
- Rumahjahitbunda
- Esterra
- Tunggadewi.id
- Angels_onlinestore
- Mafulyfood
- Kopiwayharong71

Pertemuan Tim Pusat Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan dan Lembaga Layanan Korban Kekerasan "Pelayanan Visum et Repertum di Puskesmas Bentuk Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan"





DAMAR kembali menyelenggarakan diskusi kritis. Pembahasan kali ini mengenai layanan visum et repertum untuk memperkuat layanan kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya terkait layanan bagi perempuan korban kekerasan. Pemberian pengetahuan yang lengkap mengenai visum dirasa mendesak karena masih ada Dokter di puskesmas OSSL yang tidak berani memberikan layanan visum serta merasa takut jika nanti dilibatkan sebagai saksi di persidangan karena hasil visum yang sudah dibuat. Diskusi pertemuan tim OSSL dan lembaga layanan korban kekerasan diselenggarakan pada 24 Juni 2020. Selain petugas puskesmas OSSL, dalam diskusi ini juga melibatkan Dinas Kesehatan propinsi, yang harapannya sebagai leading sektor akan terus melakukan peningkatan kapasitas untuk layanan serta untuk mengawal rekomendasi dari proses diskusi. Selain Dinas kesehatan Propinsi, juga mengundang Akademisi Fakultas Hukum Universitas lampung, yang memperkaya pengetahuan peserta mengenai aturan hukum layanan visum et repertum di puskesmas, Penyidik Unit PPA Polresta Bandarlampung, yang berbagi pengalaman mengenai kebutuhan penyidik terkait kecepatan proses layanan visum et repertum. Serta Kepala UPT PKTK rumah Sakit Abdul Muluk yang berbagi pengalaman mengenai Tantangan yang dihadapi UPTPKTK dalam pemberian layanan Visum Et Repertum.

Adapun temuan terkait layanan visum sbb.:

1. VeR sampai saat ini masih dilakukan di rumah sakit pemerintah, khususnya RSUD Abdoel Muluk Lampung, dengan pembiayaan dibebankan pada APBD Propinsi Lampung.
2. Belum semua kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk layanan perempuan korban kekerasan, dalam hal ini VeR,
3. Kejaksaan yang selalu mengharuskan VeR dari RS pemerintah.

Kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT PKTK) dalam pemberian layanan perempuan korban :

- Minim sumberdaya, terutama tenaga dokter yang harus memeriksa korban kekerasan.
- Dibutuhkan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia
- Dibutuhkan pembaharuan standar opersional prosedural dan alur layanan KTP/A.
- Ketika korban telah diperiksa di puskesmas, tetap datang ke rumah sakit untuk di visum. Padahal dokter di puskesmas bisa memberikan hasil pemeriksaan sebagai hasil visum.

Aturah hukum yang dapat dijadikan rujukan layanan visum di puskesmas

1. PMK No. 68 Tahun 2013, dimana dalam pasal 1 angka 2 disebutkan"Tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan Untuk Memberikan

Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak".

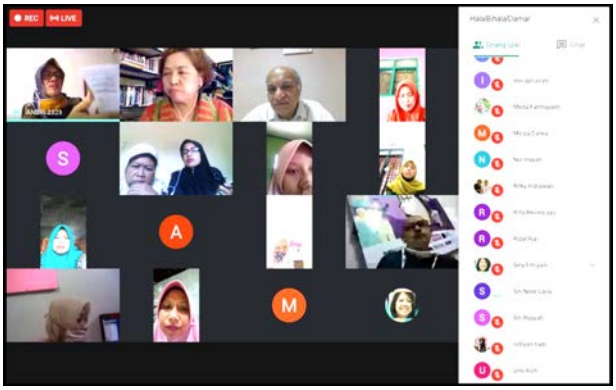
2. Pasal 4 Pemberi layanan kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan kepada anak yang diduga menjadi anak korban Kekerasan terhadap Anak (KtA) mempunyai kewajiban pada huruf (f) "melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis serta siap untuk membuat Visum et Repertum apabila diminta secara resmi, (g) memberikan informasi kepada kepolisian.
3. PP No.47 Tahun 2016 pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan "Fasilitas pelayanan Kesehatan antara lain rumah sakit dan puskesmas", dengan catatan Puskesmas bisa, asal dokter sudah terlatih, sudah diberikan pelatihan. Dokter umum bisa. (Dr. Faqih-Akademisi Unila)

Rekomendasi

- Puskesmas dapat mengajukan perencanaan tentang biaya visum karena visum juga tidak tiap hari. Puskesmas boleh melakukan visum, aturan tentang pembuatan visum di puskesmas itu sudah ada dasar hukumnya.
- Untuk ke depan diharapkan dapat menghadirkan Jaksa, Hakim, Polisi, dan Para Dokt

Gerakan Perempuan Lampung dalam Advokasi Pengawalan dan Monitoring pelaksanaan jaring pengan sosial yang tepat sasaran selama Covid 19

Lembaga Advokasi perempuan DAMAR bersama Gerakan Perempuan Lampung (GPL) menyelenggarakan diskusi virtual ***"Pengawalan data dan monitoring pelaksanaan jaringan pengaman sosial yang tepat sasaran selama covid 19"*** pada hari selasa 9 Juni 2020.



Kegiatan ini diinisiasi untuk menjawab temuan-temuan kader GPL yang terlibat aktif di desa dalam rangka pencegahan dan penanganan covid 19. Pandemi covid 19 mengharuskan perubahan strategi dan pengalokasian anggaran dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona sejak ditetapkan sebagai bencana Nasional Mei lalu. Untuk memastikan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak kebijakan sosial atau *physical distancing*, pemerintah mempersiapkan program jaring pengaman sosial.

20 kader gerakakan perempuan Lampung terlibat dalam diskusi ini mewakili serikat perempuan dari 5 kab/kota (Bandarlampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus). diskusi ini juga melibatkan pembicara dari Dinas Sosial Propinsi Lampung, Sekertaris pekon Batutegi Kec. Air naningan, Tanggamus dan Kader Serikat perempuan Bandarlampung.

Temuan di lapangan, masih ada penyaluran Jaring Pengaman Sosial yang tidak tepat sasaran. Poin-poin refleksi Gerakan Perempuan Lampung diantaranya :

1. Banyak masyarakat yang tiba-tiba menjadi miskin karena dampak dari Covid 19 seperti PHK, dirumahkan dan tempat usaha tutup. Sehingga harus ada **standar khusus pendataan masyarakat miskin** yang dirumuskan Pemerintah yang dapat mengakomodir semua masyarakat terdampak covid.
2. Pemerintah melakukan *updating* data penerima bantuan/masyarakat miskin.
3. Membangun sistem data terpadu melalui BPS sebagai pusat data Indonesia, sehingga data tidak tumpang tindih.
4. GPL memastikan proses pendataan di tingkat RT

Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial oleh Dinas Sosial Propinsi Lampung dalam penyalurannya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana sudah dibuat oleh lembaga Pusdatin dari Kemensos. Untuk bantuan penerima dampak Covid 19, data ini bersumber dari desa dan keluarga yang dihimpun oleh operator desa masing-masing. Untuk itu saya minta kepada teman-teman DAMAR dan GPL untuk ikut serta dalam memvalidasi data dilapangan dengan cara melaporkan yang ada dilapangan. (Yulya Elva-Dinas Sosial Propinsi Lampung)

Peran-peran yang bisa dilakukan oleh anggota Gerakan Perempuan Lampung adalah sebagai berikut:

- "*Menjaga tetangga",* memonitor dan memastikan lingkup terdekat (tetangga) miskin dan terdampak covid yang belum memperoleh bantuan apapun dari pemerintah
- Ikut aktif memonitor bantuan-bantuan di wilayah agar tepat sasaran.
- Ikut mengawal proses pendataan dan distribusi
- Jika ada temuan langsung sampaikan ke pihak yang berwenang bukan melalui media sosial
- Memberikan contoh, jika kawan-kawan Gerakan Perempuan Lampung yang merasa mampu dan mendapat bantuan harap dikembalikan.

FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS)



FMS Provinsi Sumatera Utara

Forum Multi Stakeholder (FMS) dampingan PESADA aktif terlibat dalam advokasi program HKSR melalui audiensi ke Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa, Lembaga Adat, Kemenag dan mediasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu FMS terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, baik melalui pendidikan kritis, mengkampanyekan pencegahan perkawinan usia anak/dini serta pengelolaan OSS&L.

Pada semester ini FMS Humbang Hasundutan menggagas kerjasama dengan Kemenag. di Kabupaten Humbang Hasundut mengenai "Advokasi Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) untuk Pencegahan Perkawinan Anak/Dini dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Humbang Hasundutan", serta advokasi pemerintah desa untuk upaya respon cepat penanganan Covid-19 dan pengawasan penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat.



Foto 1. Kegiatan FMS Audiensi ke Lembaga Adat di Kab. Humbang Hasundutan"

FMS Provinsi Riau

Pada hari Kamis dan Jum'at, tanggal 12-13 Maret 2020 PPSW Sumatra menyelenggarakan "Workshop Membangun Kerjasama Layanan Kesehatan Reproduksi Terpadu dan Pembelajaran Berbasis Masyarakat (OSS&L)". Workshop dilaksanakan di Bagansiapi-api Kabupaten Rokan Hilir. Workshop OSS&L dihadiri oleh FKPAR, KUA, Kapolsek, Aisyiyah, Puskesmas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hilir, Dinas Sosial Kab. Rokan Hilir, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat dengan jumah peserta sebanyak 25 orang terdiri dari 17 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. FKPAR yang hadir mewakili 3 kabupaten kota yakni Kampar, Pekanbaru dan Rokan Hilir.

Tujuan workshop OSS&L ini adalah untuk mensosialisasikan keberadaan OSS&L di masyarakat kepada para pihak terkait serta membangun kerjasama dengan para pihak. OSS&L adalah sebuah tempat Layanan Kesehatan Reproduksi Terpadu dan Pembelajaran Berbasis Masyarakat. OSS&L dikelola oleh kader FKPAR bekerjasama dengan lembaga pendamping PPSW Sumatra dan Puskesmas setempat. Semua peserta yang hadir menyambut baik keberadaan OSS&L ini karena akan sangat membantu tugas Puskesmas dalam meningkatkan jangkauan layanan informasi dan kesehatan kepada perempuan terutama yang tinggal di desa-desa dan tidak mau datang ke Puskesmas. Dengan adanya OSS&L ini diharapkan semua perempuan dapat terjangkau untuk mendapatkan pemenuhan HKSR dan tercapainya target SPM Kesehatan. Selain Puskesmas, pihak-pihak lain seperti Kepolisian, Tokoh Masyarakat dan Agama, Dinas-dinas pemerintah seperti Disdukcapil Keluarga berencana dan Pemberdayaan perempuan & Perlindungan Anak serta KUA dan Ormas juga dapat bekerjasama dengan OSS&L ini untuk mendukung pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan, maupun dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. Pihak kepolisian dapat menggunakan OSS&L sebagai tempat untuk memberikan informasi layanan keamanan masyarakat dan penanganan korban oleh kepolisian. KUA dapat bekerjasama dengan OSS&L untuk memberikan layanan informasi untuk perempuan muda dan orang tua dalam pencegahan perkawinan anak sesuai dengan UU.

Dengan adanya OSS&L ini diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan perempuan seperti menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematinan anak dan bayi (AKA & B), angka kekerasan terhadap perempuan (Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual), perkawinan anak dan usia dini, serta kekerasan dalam pacaran. Selain itu, workshop OSS&L ini juga bertujuan untuk memberikan penyadaran HKSR dan Gender kepada para pihak serta menyusun draf Standar Operasional Prosedur (SOP) OSS&L yang dapat memetakan peran setiap stake holder untuk pemenuhan HKSR dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.

Proses diskusi berlangsung dinamis karena jumlah laki-laki lumayan banyak, yaitu 8 orang yang berasal dari KUA, Tokoh masyarakat dan agama serta kepolisian. Hampir semua peserta laki-laki ini pernah mendengar istilah gender tetapi belum pernah mengikuti diskusi penyadaran gender, sehingga pemahaman yang dimiliki tentang gender banyak yang keliru dan berakibat sering menyalahkan perempuan jika terjadi kasus kekerasan maupun kekerasan seksual atau pelanggaran hak kesehatan reproduksi. Di pihak lain semua peserta dari FKPAR dan Ormas yang hadir sudah pernah mengikuti pelatihan dan diskusi penyadaran gender dan HKSR, sehingga diskusi menjadi seimbang antara peserta perempuan dan laki-laki. Pada awalnya banyak peserta laki-laki yang mengatakan tidak bisa mengikuti workshop secara penuh selama 2 hari karena banyak pekerjaan kantor, tetapi akhirnya semua peserta dapat mengikuti workshop selama 2

hari penuh; dan bahkan mereka mengaku banyak mendapatkan pencerahan tentang gender dan HKSR, serta mengaku menjadi lebih berpihak untuk pemenuhan HKSR dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.

Pihak Puskesmas mengatakan sangat terbantu dengan adanya OSS&L, sehingga Puskesmas Bagansiapi-api mengusulkan untuk menambah desa untuk perluasan jangkauan layanan kepada perempuan di kecamatan Bangko. Pihak Puskesmas Batu Hampar juga tertarik untuk membuat MoU dengan PPSW Sumatra untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada perempuan di kecamatan Batu Hampar. Para aparat desa yang hadir memberikan usulan agar OSS&L dapat dibuat di desanya, tetapi PPSW Sumatra menjelaskan bahwa OSS&L ini dibuat di tingkat kecamatan. Semoga nanti meskipun program HKSR MAMPU telah selesai kegiatan OSS&L tetap dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh para pihak**.**



Foto 2. PPSW Sumatra - Peserta workshop OSS&L di Rokan Hilir

FMS Propinsi Sumatera Barat

Forum Multi-Stakeholders (FMS) Sumatera Barat aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di 3 kab./kota (Padang, Padang Pariaman, dan Tanah Datar). Anggota FMS yang aktif terlibat antara lain tokoh adat, tokoh agama, Puskesmas, KUA, wali nagari/lurah, dan Dinas Kesehatan. Dalam masa Pandemi Covid-19, FMS Sumatera Barat melakukan pendidikan kritis, mengkampanyekan pencegahan perkawinan usia anak, dan membangun kerja sama dengan CO lokal dampingan LP2M dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di nagari/kelurahan.

Pada masa Pandemi Covid-19, terdapat dua Puskesmas yang telah melakukan Pendidikan Kritis yaitu Puskesmas Kec. Enam Lingkung (Puskesmas OSS&L) di Kab. Padang Pariaman dan Puskesmas Lintau Buo II di Kab. Tanah Datar. Pendidikan kritis Covid-19 di Puskesmas Enam Lingkung terlaksana pada 4 April 2020 dengan peserta sebanyak 10 orang CO perempuan dan 2 CO perempuan muda dari 7 nagari di 2 kecamatan, yaitu Enam Lingkung dan Lubuk Alung. Sedangkan pendidikan kritis di Kab. Tanah Datar terlaksana pada tanggal 18 April 2020 di Aula Kantor Wali Nagari Pangian dengan peserta sebanyak 10 orang CO perempuan dan 2 orang CO perempuan muda dari 5 nagari di 2 kecamatan, yaitu Lintau Buo dan Lintau Buo Utara.



Foto 3. Suasana Diskusi pada Kegiatan Pendidikan Kritis oleh Puskesmas

Melalui kegiatan ini, CO diajak untuk memahami karakteristik, gejala, cara pencegahan, dan cara penanganan Covid-19 serta protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan memahami informasi lengkap tentang Covid-19 diharapkan CO bisa ikut menyebarkan informasi yang tepat kepada perempuan, perempuan muda, dan masyarakat dalam pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19. Dakam kegiatan ini CO juga diajak untuk praktik membuat *hand sanitizer*, disinfektan, dan masker sesuai standar kesehatan.

Dalam merespon Covid-19, tokoh agama di 3 Kab./Kota ikut serta melakukan kampanye pencegahan penularan dan penanganan Covid-19 di tempat ibadah. Tokoh agama memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menaati protokol kesehatan yang berlaku dan menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dengan menggunakan media flyer dan poster, tokoh agama menyampaikan informasi tentang Covid-1 kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah di tempat ibadah. Poster pun ditempel di tempat ibadah dan tempat umum lainnya agar masyarakat bisa membacanya.



Foto 4. Diskusi CO bersama wali Nagari dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Sementara itu kasus perkawinan usia anak juga masih terjadi di masa pandemi Covid-19. Menurut KUA, hal ini terjadi karena alasan ekonomi keluarga, pendidikan perempuan yang rendah, juga keinginan orang tua untuk segera menikahkan anak. Oleh karena itu, CO di Kab. Padang Pariaman mengajak KUA Kecamatan Enam Lingkung untuk terus mengkampanyekan upaya pencegahan perkawinan usia anak di masa pandemi ini. Sedangkan CO di Kab. Tanah Datar mengajak Wali Nagari Tanjung Bonai mendiskusikan upaya bersama yang dapat dilakukan dalam membantu peningkatan kapasitas perempuan usaha kecil dan kualitas usaha perempuan di masa pandemi Covid-19. Selain itu, CO bersama pemerintah nagari juga bersepakat untuk bekerja sama dalam memantau pelaksanaan pembagian BLT kepada masyarakat dan melapor jika terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan Program BLT tersebut.

FMS Propinsi Jambi

Pendidikan pencegahan dan respon cepat penyebaran Covid 19 untuk kader khusus yang berasal dari Forum Multi stakeholders (Tokoh Agama, Adat, Suami peduli HKSR, dan Pemuda peduli HKSR) dari Kabupaten Merangin, Bungo dan Sarolangun, diikuti oleh 15 orang : 6 perempuan dan 9 laki –laki. Dari jumlah tersebut, 11 orang diantara mereka sebagai peserta, 1 orang narasumber dan 3 orang merupakan personil pelaksana APM.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Aliansi Perempuan Merangin pada tanggal 11 April 2020 dengan narasumber Bapak Hary.F dari Dinas Kesehatan Kab Bungo. Tujuan umum yang ingin dicapai dari rangkaian kegiatan ini adalah: menggerakkan para kader dan forum-forum dampingan Aliansi Perempuan Merangin terampil membantu sosialisasi, perluasan informasi, dan terampil membantu upaya-upaya pencegahan penularan virus corona/covid-19; maupun menangani kasus-kasus yang diakibatkan oleh wabah tersebut. Serta mengingat ulang pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan bahasa yang mudah dipahami di komunitas, sebagai dasar membangun immunitas dan mengatasi segala bentuk wabah. Diharapkan para peserta kegitan ini dapat meneruskannya di lapang dengan jangkauan lebih luas, dengan tetap dalam kelompok-kelompok kecil sesuai protocol standar kesehatan yang telah dikeluarkan Pemerintah untuk pencegahan penularan covid 19.

Materi-materi dalam pendidikan ini meliputi :

1. Definisi Operasional: Orang Tanpa Gejala /OTG, Orang Dalam Pemantauan /ODP, Pasien Dalam Pengawasan /PDP, Konfirmasi, Komorbiditas.
2. Pencegahan Level Individu:Upaya Kebersihan Personal dan Rumah, Peningkatan Imunitas Diri dan Mengendalikan Komorbid**.**
3. Pencegahan Level Masyarakat **:** Pembatasan Interaksi Fisik (*Physical contact/physical distancing,* Menerapkan Etika Batuk dan Bersin, Karantina Kesehatan, Jaga Jarak Fisik dan Pembatasan Sosial (*Physical and Social Distancing*)
4. Usaha Perlindungan Diri di Sarana Publik
5. Peran Institusi Kesehatan, Peran Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peran Pemerintahan Kelurahan/ Desa, RT-RW dan Kader Kesehatan, Peran Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, Peran Relawan
6. Alur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) masyarakat tanpa tatap muka
7. Alur penanganan covid-19 untuk tenaga medis, alur penanganan cepat covid-19 untuk masyarakat
8. Agar lebih terampil membuat dan menggunakan *hand sanitizer* dan disinfektan yang sesuai standar Kesehatan. Peserta juga melakukan praktek mencuci tangan yang benar dan membuat *hand sanitizer* serta disinfektan dengan menggunakan bahan yang masih mudah diperoleh





Foto 5. Kegiatan Pendidikan Kritis FMS untuk Pencegahan dan Respon Cepat Penyebaran Covid 9

FMS Propinsi Bengkulu

Pada bulan April 2020, mulai terlihat berkurangnya kualitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas dan Posyandu dikarenakan pandemi Covid 19. Banyak Puskesmas yang menghimbau masyarakat untuk tidak datang ke Puskesmas, bila tidak dalam keadaan darurat. Masyarakat disarankan untuk melakukan pengobatan sendiri bila mengalami ganguan kesehatan ringan, yaitu dengan obat tradisonal seperti jamu-jamuan. Dengan adanya kesan penolakan dari pihak Puskesmas tersebut menandakan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid 19 sudah sangat menggangu sistem layanan kesehatan di Puskesmas. Juga ketidaksiapan dan lambannya proses beradaptasi untuk pencegahan serta pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis, baik di tingkat Kota/Kab maupun Provinsi.

Inisiatif dan upaya bersama dilakukan di 6 Puskesmas wilayah program yaitu: Puskesmas Pasar Ikan, Puskesmas Padang Serai, Puskesmas Talang Tinggi, Puskesmas Babatan, Puskesmas Prumnas dan Puskesmas Sumber Urip. Inisiatif awal yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pelatihan bersama dengan kader, pemerintah Desa/Kelurahan untuk Pencegahan dan Respon Cepat Penyebaran Virus Covi 19. Beberapa desa memperkuat sistem dengan pendataan terutama warga yang baru pulang dari zona merah.



Pembelajaran para komunitas tersebut menjadi landasan untuk melakukan desakan pada pemerintah kab/kota dan provinsi untuk memperkuat APD dan dukungan sumber daya untuk menjalankan pelayanan Posyandu. Bila layanan posyandu tidak dijalankan dalam tiga bulan kedepan, maka akan berdampak pada beberapa persoalan kesehatan pada balita, ibu hamil dan lansia yang jumlahnya mungkin akan meningkat pesat. Komunikasi juga dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan kota/kab dan provinsi serta anggota FMS secara online/daring untuk mengadvokasi agar dapat dijalankan kembali Posyandu.

Upaya advokasi bersama FMS tersebut direspon baik oleh Dinas Kesehatan Provinsi selaku penangungjawab utama dalam penanganan pandemi Covid 19 ini. Di awal bulan Mei 2020, Dinkes Provinsi mengeluarkan himbauan pada Dinas Kesehatan Kota/Kab untuk tetap melakukan Posyandu di masing-masing wilayah. Himbauan dari Dinas Kesehatan Provinsi kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial seperti grup WhatsAp, Facebook dan media cetak seperti Koran; bahwa Posyandu akan di buka kembali. Posyandu dimulai dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan tetap melakukan monitoring bersama terhadap upaya pencegahan dan penanganan covid 19 di tingkat desa/kel.



"Tidak tau sumber api dari mana. Kita melihat ada kepulan asap tebal kepakaran yang meludeskan bangunan sekolah tersebut berasal dari ruang kantor dan menyambar sampai jam 11.00. Saya dapat kabar lewat telpon bahwa sekolah kebaran," demikian Zuraini.**(cup)**

Kegiatan Posyandu Datangi Belita

SELUMA - Upaya mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) dan menyikapi Maklumat Kapolri, Posyandu di Kabupaten Seluma akhirnya dibatalkan. Meskipun demikian, pemberian vaksin dan imunisasi tetap berjalan seperti biasa. Para petugas akan datangi rumah balita secara langsung. Bahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengeluarkan kebijakan tersebut dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh Puskesmas dan kader Posyandu.

Kepala Dinas (Dinkes) Kesehatan Kabupaten Seluma, Rudi Syawaludin melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Seluma, Arlan Aksa, mengatakan beradasarkan surat edaran untuk penanganan penyebaran virus Corona, untuk Posyandu sementara ini dibatalkan.

Mengingat imbauan terkait seluruh kegiatan yang mengumpulkan masyarakat banyak ditiadakan dulu. Maka posyandu yang memang berpotensi mengumpulkan masyarakat banyak, akhirnya dibatalkan sementara hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Tapi pemberian vaksin dan imunisasi tetap dilaksanakan. Petugas wajib mendatangi belita dari rumah kerumah sesuai dengan data.

"Sementara ini dibatalkan. Tapi pemberian vaksin dan imunisasi tetap dilaksanakan seperti biasa. Bedanya kita terapkan pola jemput bola," jelas Rudi.

Ditambahkannya pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh Pukesmas yang ada di kabupaten Seluma. Tujuannya agar para petugas kesehatan melakukan pendataaan pada belita dan ibu hamil di daerah masing-masing. Setelah itu petugas diwajibkan memberikan vaksin dan imunisasi di rumah pasiennya baik untuk balita maupun ibu hamil.

Pembatalan posyandu belum diketahui sampai kapan. Mengingat saat ini kondisi Indonesia maupun Provinsi Bengkulu tengah darurat wabah Covid 19. "Kita tunggu dulu, sampai kapan kondisi seperti ini mebaik," demikian Rudi.**(cup)**

Keterlibatan pemerintah desa/kelurahan melalui dana desa/ kelurahan dalam upaya pencegahan dan penanganan dampak covid 19 merupakan peluang untuk melibatkan semua pihak menghadapi pencegahan penularan Covid 19. Upaya tersebut menjadi prestasi bersama di masing-masing desa/ kelurahan dampingan unttuk tetap menjalankan kegiatan posyandu; baik posyandu Balita, Ibu Hamil dan lansia.

FMS Propinsi Sumatera Selatan

Pertemuan Forum Multi Stakeholder (FMS) Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan dan Anak pada semester I tahun 2020, dilaksanakan secara "offline"/tatap muka dan secara "online"/virtual. Pertemuan secara tatap muka dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pertemuan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat Tim PKK Kabupaten OKI. Jumlah peserta 25 orang terdiri dari 24 orang perempuan dan 1 orang laki-laki dengan agenda pembahasan mengenai Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan bagaimana turunannya di daerah serta *sharing* dari semua dinas/instansi anggota FMS.

Perkawinan anak merupakan salah satu tindakan kekerasan terhadap anak. Anak yang menikah usia dibawah 18 tahun memiliki kerentanan lebih besar mengakses pendidikan, kesehatan serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Maka diperlukan upaya bersama atau perlu bersinergi untuk mencegah perkawinan anak. Bappenas bekerja sama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang didukung Program Australia Indonesia *Partnership for Justice* (AIPJ2) dan Program MAMPU yang merupakan program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia, UNFPA, dan UNICEF menginisiasi upaya kolaboratif untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). STRANAS PPA terdiri dari lima strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan. Koordinasi Pemangku Kepentingan.

STRANAS PPA diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi pencegahan terjadinya perkawinan anak.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh peserta, anggota FMS aktif melakukan penyuluhan ke masyarakat bahkan ke keluarga-keluarga mengenai dampak perkawinan di usia anak dan memberikan beberapa contoh kasus akibat menikah muda. Materi pencegahan perkawinan anak dan penghapusan kekerasan seksual selalu diselipkan didalam ceramah ataupun kegiatan yang dilakukan lembaga anggota FMS. Beberapa lembaga anggota juga bahkan sering melakukan pendampingan dan penanganan kasus yang dialami anak. Banyak perkawinan anak terjadi karena faktor: kebudayaan, ekonomi, pendidikan dan lingkungan.

Pertemuan secara virtual dilakukan menggunakan aplikasi Zoom bagi anggota FMS Advokasi HKSR Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim, dikarenakan pertemuan dilakukan pada situasi pandemic covid 19. Pertemuan dilakukan pada tanggal 16 April 2020, dengan jumlah peserta sebanyak 18 orang terdiri dari 13 Perempuan dan 5 Laki-laki. Pada pertemuan kali ini, membahas mengenai respons cepat pencegahan dan penanganan covid 19. Mengingat keberadaan virus ini masih baru dikenali, menyebar dengan cepat, belum ada obat penangkal maupun untuk penyembuhan, sementara pemahaman masyarakat tentang virus ini sangat beragam, bahkan membingungkan. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan mengambil peran, termasuk FMS Advokasi HKSR di semua kabupaten/kota dampingan WCC Palembang. FMS dan WCC Palembang akan memfasilitasi pendidikan dan diskusi-diskusi kritis di lapangan bagi perempuan akar rumput, keluarga mereka dan para pihak berpengaruh agar memahami dan menyadari seluk beluk secara praktis, terapan; pencegahan penyebaran, penularan Virus Corono/Covid-19.

Anggota FMS Advokasi HSKR Kota Palembang dan Kab. Muara Enim berkomitmen untuk menyampaikan informasi mengenai covid-19 (jenis penularan, gejala dan cara pencegahannya) di lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal mereka dan lembaga/institusi mereka masing-masing.



FORUM PEREMPUAN MUDA (FPM)



FPM Provinsi Aceh

AKSI ORANG MUDA UNTUK PEMENUHAN HKSR DI ACEH

Sebanyak 80 orang (51 perempuan dan 29 laki-laki) perwakilan Forum Perempuan Muda Aceh dan anak muda Aceh yang mewakili lintas komunitas menyuarakan pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) untuk kelompok muda Aceh melalui aksi yang mengusung tema "Orang Muda Berani Bersuara untuk Penghapusan Perkawinan Anak dan Kekerasan Seksual" pada 14 Februari 2020 di Banda Aceh.

Aksi tersebut dimulai dengan pembekalan seputar informasi HKSR dan diskusi orang muda pada pagi hari nya di Escape Building Desa Alue Deah Teungoh dengan menghadirkan narasumber pemantik Kanit PPA Polda Aceh:Kompol Elviana, Ketua Komnas Perempuan: Azriana, Ketua P2TP2A DPPPA Aceh: Amrina Habibi dan Direktur Eksekutif Flower Aceh:Riswati.

Setelah pembekalan tersebut, barulah mereka berdiskusi dan memetakan persoalan apa saja yang ada di daerah berdasarkan hasil survei yang diisi dan curah pendapat mendalam, serta menetapkan 7 rekomendasi yang harus disampaikan kepada pemgambil kebijakan di Aceh melalui audiensi kepada BKKBN dan DPRA. Audiensi ini bertujuan mendukung dan mempertegas bahwa edukasi, kampanye dan upaya BKKBN selama ini diharapkan dapat lebih maksimal menyasar sampai tingkat desa. Sedangkan kepada DPRA diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan dan anggaran untuk mendukung upaya pemenuhan HKSR bagi kelompok muda di Aceh.

Adapun 7 rekomendasi yang disampaikan kepada DPRA dan BKKBN Aceh meliputi:

1. Mewujudkan komitmen Negara untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan dan memberi perlindungan maksimal bagi masyarakat Aceh, khususnya perempuan, anak dan orang dengan disabilitas
2. Memastikan terintegrasinya materi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual dalam kurikulum dengan metode yang menarik bagi kelompok muda.
3. Memastikan tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi seksual yang mudah diakses bagi kelompok muda sampai ke tingkat desa.
4. Memastikan terjadinya sinkronisasi kebiajkan yang berkaitan dengan pemenuhan HKSR dan perlindungan perempuan dan anak di Aceh.
5. Mendorong diterbitkannya kebijakan tentang retribusi sebagai upaya pemulihan yang menyeluruh spanjang hayat bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk landasan implementasi Qanun Hukum Jinayah.
6. Memperkuat upaya kolaboratif lintas instansi dan elemen dalam mendukung pemenuhan HKSR kelompok muda di Aceh.
7. Mendorong elemen Negara dan masyarakat di Aceh untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual.

Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif oleh Forum Perempuan Muda bersama Flower Aceh bersama Flower Aceh, Millenial Empowerment, Mitra MAMPU-Peduli (PKBI, KPI, PEKKA, LBH APIK dan RPuK), Forum Puspa Aceh, Balai Syura dan jaringan lainnya di Aceh.





Foto 1. Audiensi Kelompok Muda dengan Wakil Ketua I DPRA Aceh, Hendra Budian dan Kepala BKKBN Aceh berserta staf

FPM Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka peringatan Penghapusan Kekerasan Seksual, Pesada melakukan peningkatan kapasitas perempuan muda di hari pertama di rangkaian hari peringatan. Peringatan ini dilaksanakan selama 2 hari di tanggal 13 -14 Februari 2020 dengan peserta 77 orang perempuan, yang dilaksanakan di tingkat propinsi. Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh pengetahuan mengenai tubuh, HKSR perempuan, berbagi pengalaman mengenai kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan, kasus perkawinan usia anak/dini dan penyebabnya, dampak yang ditimbulkannya serta sharing dari konferensi ICIPRH. Kemudian dihari ke 2 acara melibatkan jaringan kampanye bersama.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari organisasi Fohati, Kohati, PSGA UIN, FJP. Kegiatan ini diliput oleh beberapa media diantaranya Tribun Medan. Perayaan mengangkat tema: “Stop PerkawinanAnak/Dini Menuju Zero Sexual Violence Terhadap Perempuan Demi Mendorong Kepemimpinan Perempuan”.





Foto 2. Kegiatan Kampanye Peringatan Hari Penghapusan Kekerasan Seksual

Selain kegiatan di atas, diadakan diskusi krtisis “Mendorong peran perempuan muda dan lelaki untuk Pencegahan Perkawinan Anak & Dini (<21 tahun) di Era Covid-19.

Ada 278 orang (Pr:264, Lk:56) perempuan muda dan lelaki muda mendapat pendidikan kritis dengan tema"Mendorong Peran Perempuan dan Lelaki Muda dalam Pencegahan Perkawinan Anak & Dini (<21 tahun) Dalam Situasi Covid 19. Selain itu juga UU.No 16 Tahun 2019 " Pencegahan Perkawinan Anak " (batasan usia perkawinan) dan dampak perkawinan anak/dini serta paham mengenai Covid-19 serta pencegahannya. Peserta antusias mengikuti diskusi, mereka semakin paham mengenai batasan usia anak & dini, dampak perkawinan anak & dini serta upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan anak/dini dengan cara berwirausaha. Dari hasil diskusi remaja teridentifikasi usaha yang akan ditindaklanjuti di bidang kewirausahaan perempuan muda, yaitu menjahit masker, pembuatan bakul/kembal/tikar dan aksesoris dari pandan (alat alat yang digunakan adat suku Pakpak), pembuatan sabun krim, yang dipasarkan secara online. Hal ini bertujuan untuk kemandirian perempuan muda dan keberlanjutan FPM sebagai kelompok perempuan muda mulai dari tingkat pedesaan hingga ke Provinsi dan Nasional.



Foto 3. Pertemuan FPM Kabupaten Pakpak Bharat



Foto 4. Pertemuan FPM Kabupaten Dairi

FPM Propinsi Sumatera Barat

Dua puluh lima (25) orang CO (Community Organizer) perempuan muda dari 3 kab./kota (Padang, Padang Pariaman, dan Tanah Datar) terlibat aktif dalam Kegiatan Lokalatih bagi Forum Perempuan Muda (FPM) Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Hotel Daima Kota Padang pada 12-13 Februari 2020. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman kritis perempuan muda terkait HKSR-Gizi remaja dan mengasah kemampuan perempuan muda dalam melakukan advokasi untuk pemenuhan HKSR-Gizi.





Foto 5. Suasana Belajar (kiri) dan foto bersama (kanan) pada Kegiatan Lokalatih FPM

Kegiatan lokalatih FPM difasilitasi oleh relawan PKBI Sumatera Barat, Madonna. Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan anggota kelompok perempuan muda di 15 nagari/kelurahan dampingan LP2M yang sudah pernah mengikuti berbagai diskusi tentang HKSR-Gizi di tingkat nagari, kabupaten, hingga provinsi. Selama proses belajar, fasilitator lebih banyak menggunakan metode berbagi pengalaman antar peserta terkait isu atau masalah HKSR-Gizi yang peserta ketahui atau alami seperti pengalaman menarche (menstruasi pertama), pengalaman di masa puber, pengalaman dalam pacaran, maupun pengalaman terkait masalah gizi (obesitas, anemia, kurang gizi, dll). Metode berbagi pengalaman ternyata mampu membuat hubungan antar peserta maupun antara peserta dengan tim LP2M menjadi semakin dekat dan terbuka. Metode ini juga mampu membuat semua peserta aktif menyuarakan pendapatnya.

Dalam Kegiatan lokalatih ini, peserta juga diajak untuk melakukan Klarifikasi Nilai (VCAT), menonton film tentang HKSR-Gizi, membahas kembali tentang tugas perkembangan remaja, serta mengidentifikasi permasalahan utama remaja di kab./kotanya masing-masing. Tidak hanya memperkuat pemahaman peserta tentang HKSR-Gizi, melalui Kegiatan Lokalatih ini peserta juga belajar melakukan advokasi kepada para pihak untuk mendorong pemenuhan HKSR-Gizi bagi anak.

Sementara itu dalam rangka Peringatan Hari Anti Kekerasan Seksual pada 14 Februari 2020, FPM bersama perempuan dan laki-laki muda dari enam lembaga lainnya yang tergabung dalam "Jaringan Millenial Peduli HKSR Sumatera Barat" melakukan Kegiatan Aksi bersama untuk mengkampanyekan "STOP Kekerasan Seksual pada Anak" di Studio Radio Republik Indonesia (RRI) Padang. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 70 orang (56P, 14L) perwakilan tujuh lembaga peduli anak, yaitu Gugah Nurani Indonesia (GNI), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC), dan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M).



Foto 6. Dialog Interaktif dalam Rangka Peringatan Hari Anti Kekerasan Seksual 2020

Aksi Bersama Peringatan Anti Kekerasan Seksual dilaksanakan dalam bentuk dialog interaktif antara kelompok millenial dengan tiga orang narasumber dari Bundo Kanduang Kota Padang (Ketua P2TP2A), Harneli Bahar; Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Padang, Ira Maureska; dan Direktur NPWCC, Rahmi Merri. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan ruang dialog antara kelompok millenial dengan para pihak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Melalui kegiatan ini, kelompok millenial menyampaikan beberapa rekomendasi kepada para pihak antara lain, perlunya pendidikan kesehatan seksual reproduksi masuk dalam kurikulum sekolah, adanya anggaran untuk pencegahan perkawinan usia anak, adanya kerja sama para pihak dalam penanganan kasus kekerasan pada anak, meningkatnya peran Bundo Kanduang dalam melakukan pendidikan HKSR kepada orang tua, serta adanya komitmen para pihak untuk mendorong segera disahkannya RUU-PKS.



Foto 7. Foto Bersama FPM dengan Narasumber (kiri), dengan Jaringan Millenial (kanan)

Selama masa pandemi Covid-19, anggota FPM di 3 kab./kota terlibat dalam Kegiatan Diskusi Kritis Covid-19 tingkat Provinsi dan Pendidikan Kritis Covid-19 oleh Puskesmas. Melalui kegiatan ini, FPM mendiskusikan peran CO perempuan muda dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, promosi kesehatan seksual reproduksi remaja, serta kampanye pencegahan perkawinan usia anak. Sebanyak 49 CO perempuan muda di 3 kab./kota mendapat peningkatan kapasitas akses layanan dan

menjaga kesehatan reproduksi remaja saat masa pandemi Covid-19, pentingnya usaha bagi perempuan muda, serta bahaya perkawinan usia anak.

FPM Propinsi Jambi

Peningkatan Kapasitas dan Temu Perempuan Muda Jambi 2020

Aliansi Perempuan Merangin (APM) menggelar Perayaan Anti Kekerasan Seksual dengan kegiatan yang dikemas dalam bentuk Peningkatan Kapasitas dan Temu Perempuan Muda Jambi yang dilaksanakan di Talangkawo - Merangin pada tanggal 13 – 15 Februari 2020. Tema Perayaan tahun 2020 ini adalah " Perempuan Muda Kuat, terbebas dari Perkawinan anak, Kekerasan Seksual dan Kekurangan Nutrisi". Kegiatan peningkatan kapasitas dan temu forum perempuan muda Jambi ini di adakan dengan tujuan sebagai berikut : 1. Menguatnya pemahaman peserta tentang dampak perkawinan anak dari segi Kesehatan, pendidikan dan akses terhadap sumber daya yang ada bagi Perempuan; 2. Menumbuhkan inisiatif peserta untuk melakukan upaya dalam pendewasaan usia perkawinan untuk mewujudkan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan; 3.Peserta memiliki komitmen untuk terus berjuang dan melawan segala bentuk penindasan atau ketidakadilan terhadap perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

Kegiatan perayaan ini diikuti oleh 57 orang (55 Perempuan dan 2 orang Laki-laki) yang berasal dari perwakilan kelompok perempuan muda dampingan APM di Kabupaten Merangin, Bungo, dan Sarolangun, perwakilan Pelajar/Pik-R, Kelompok, Perwakilan Forum anak dan Upik Merangin, Perwakilan putri Margo Tabir, dan jaringan perempuan muda di propinsi Jambi. Mereka adalah perempuan muda yang selama ini bersama APM mendorong adanya kebijakan, proses hukum pelanggaran hak - hak perempuan dan anak di tingkat Kabupaten dan Propinsi Jambi.

Sesuai dengan tema dan kebutuhan peserta, kegiatan ini menghadirkan nara sumber dari: Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Merangin. Mereka menyampaikan dan sharing bersama peserta seputar Kekerasan seksual, Perkawinan usia anak, Kespro Remaja dan Stunting. Dibantu fasilitator, peserta diajak untuk mendiskusikan bersama masalah dengan metoda *body mapping*, kepemimpnan, intoleransi dan *Attitude*. Sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan seksual, peserta melakukan *Flash mob dance One Billion Rising*/OBR bersama – sama dengan penuh semangat dan kegembiraan.

Peserta juga dilatih untuk merancang/membuat media kampaye seputar isu HKSR, khususnya stop perkawinan usia anak, kekerasan seksual, dan Stunting. Mereka menggunakan media video, poster, drama dan lagu dalam berkampanye. Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk menambah keterampilan peserta dalam merancang, membuat, mempresentasikan, dan memanfaatkan informasi HKSR sebagai alat advokasi dan menyampaikan kembali ke komunitasnya dengan cara yang menarik dan kreatif. Di akhir kegiatan, Forum Perempuan Muda Jambi melakukan tekad dan menandatangani pernyataan sikap untuk mengkampanyekan Stop perkawinan usia anak, kekerasan seksual dan mencegah stunting.

Untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kelanjutan dalam melalukan Pengorganisasian untuk Penguatan kepemimpinan dan kekuatan kolektif (ekonomi dan pencegahan perkawinan anak) Forum Perempuan Muda Jambi juga melakukan perteman koordinasi pada tanggal 8 Juni 2020. Diikuti oleh 20 orang, mereka adalah ketua dan pengurus dari 7 kelompok perempuan muda dampingan APM. Dalam kesempatan ini Pendamping dari APM juga memperkenalkan rancangan organisasi, alur komukasi, koordinasi dan kegiatan, khususnya topik diskusi kritis di tingkat FPM Sumatera, dimana anggota kelompok – kelompok dampingan APM ini menjadi bagian dari FPM Sumatra tersebut.







Foto 8. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Temu Perempuan Muda Jambi

FPM Provinsi Bengkulu

Dampingan Cahaya Perempuan WCC

Pertemuan Forum Perempuan Muda Provinsi Bengkulu Dampingan Cahaya Perempuan WCC dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan Seksual Tahun 2020 dengan tema "Suara Kaum Muda untuk Hidup Tanpa Kekerasan Seksual & Perkawinan Anak". Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020 bertempat di Hotel Santika Kota Bengkulu, dengan jumlah orang terlibat sebanyak 90 orang yang unsurnya Forum Multi Stakeholder Provinsi Bengkulu, Perwakilan Forum Perempuan Muda Kab. Seluma, Perwakilan Forum Perempuan Muda Kab. Rejang Lebong, Perwakilan Forum Perempuan Muda Kota Bengkulu, Forum GENRE Provinsi Bengkulu, Karang Taruna, Remaja Islam Masjid (Risma), Kelompok Dampingan PUPA.

Kegiatan ini sebagai upaya melakukan penguatan forum menggunakan media digital untuk terus mengkampanyekan Pencegahan Perkawinan Anak sesuai mandat Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Peraturan Gubernur Nomor 33/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Propinsi Bengkulu, Peraturan Bupati Seluma Nomor 27/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kab. Seluma, Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Seluma. Dalam kegiatan ini yang menjadi narasumber adalah :

- Yuliardi Hardjo Putra M.Si (Dosen Komunikasi Universitas Dehasen dan Jurnalis Liputan 6) memberikan pemaparan kampanye digital dan Praktek Kampanye Digital membuat video pendek, flyer, dan poster oleh masing-masing kelompok didampingi oleh mentor
- Choirul dari Forum Genre Bengkulu memberikan pemaparan tentang Program GenRe untuk mencegah perkawinan anak.
- Fitria Arimurti dari Forum Perempuan Muda Provinsi Bengkulu yang memberikan informasi tentang program Forum Perempuan Muda yang telah dilaksanakan di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Rejang Lebong.
- Ayumudya dari Forum Anak Provinsi Bengkulu tentang mencegah perkawinan anak dan mendukung Kota Bengkulu Ramah Anak.

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- Perempuan Muda dan Laki-laki Muda aktif menyuarakan atau mengkampanyekan akhiri perkawinan usia anak melalui alat kampanye digital.
- Adanya kesepakatan dari Perempuan Muda dan Laki-laki Muda dalam mengkampanyekan Pencegahan Perkawinan di Usia Anak tahun 2020-2021.
- Adanya keterlibatan anak muda dalam merekomendasikan pencegahan kekerasan seksual di Bengkulu.
- Dari hasil kegiatan ini Forum Perempuan Muda Launcing dan Upload" kampanye digital pencegahan perkawinan anak serentak di media sosial.
  Tagar yang disepakati adalah : #gerakbersama #stopperkawinananak #stopkekerasanseksual #sahkanruupks #gerakrafflesiamuda

FPM Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Kolektif dalam rangka Peringatan Hari Anti Kekerasan Seksual
"Suara dan Aksi Anak Muda Sumatera Selatan untuk
Penghapusan Kekerasan Seksual dan Pencegahan Perkawinan Anak"

Tanggal 14 Februari seringkali diperingati anak muda/remaja sebagai perayaan Hari Kasih Sayang atau "Valentine Day". Tetapi sejak 10 tahun terakhir ini, di beberapa negara termasuk di Indonesia beberapa organisasi perempuan ataupun komunitas anak muda juga memperingati tanggal 14 Februari sebagai Hari Anti Kekerasan Seksual.

Masalah kekerasan seksual ini sudah merebak ke berbagai aspek, bukan hanya aspek publik melainkan juga pada aspek domestik itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pemerkosaan, pelecehan dan eksploitasi seksual dan kekerasan seksual oleh keluarga atau saudara sendiri. Maraknya kasus kekerasan seksual yang

terjadi belakangan ini tidak lagi hanya mengancam para remaja yang rentan terhadap informasi yang salah mengenai seks. Eksploitasi seksual pada anak dibawah umur nyatanya juga sering terjadi oleh orang orang terdekat yang bahkan dilakukan oleh keluarga korban sendiri.

Beberapa temuan dari penelitian kualitatif yang pernah dilakukan Konsorsium Permampu dan WCC Palembang menunjukkan minimnya pemahaman dan kesadaran mengenai seksualitas, serta otonomi anak muda terhadap tubuhnya. Pendidikan mengenai tubuh atau seksualitas tidak dilakukan dalam keluarga karena berbagai alasan dan latar belakang, sementara pendidikan di sekolah tidak menjawab masalah tersebut. Dampak dari kurangnya kesadaran terkait hal ini diantaranya adalah maraknya kekerasan seksual dan perkawinan anak.

Kelompok muda khususnya perempuan masih menghadapi kendala akibat kemiskinan, perkawinan, kehamilan di usia anak, dan minimnya akses serta ketersediaan layanan kesehatan reproduksi yang ramah. Satu (1) dari 4 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun, dan sekitar 600.000 perempuan di seluruh Indonesia menikah sebelum berusia 16 tahun. Selain itu rendahnya pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi mengarah kepada tingginya kerentanan perempuan muda di Indonesia terhadap berbagai permasalahan kesehatan seksual, reproduksi dan AIDS (BPS, 2017 : UNICEF, 2017)

Sebagai isu multisektor, pencegahan kekerasan seksual dan pencegahan perkawinan anak memerlukan kontribusi dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Sehubungan dengan hal itu, melalui momentum Hari Kasih Sayang ataupun Hari Anti Kekerasan Seksual tahun 2020, Forum Perempuan Muda Sumsel bersama Women's Crisis Centre (WCC) Palembang sebagai anggota Konsorsium Permampu bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan melakukan Aksi kolektif "Suara dan Aksi Anak Muda Sumatera Selatan dalam rangka Penghapusan Kekerasan Seksual dan Pencegahan Perkawinan Anak" dengan serangkaian kegiatan berupa:

- Talkshow Edukatif dengan tema "Kasih Sayang, Cinta dan Kekerasan"
- Drama Musikal/Pentas teater oleh Teater TERIAX (SMA PGRI 2 Palembang)
- Pentas Seni (Puisi dan Tari Kreasi) oleh Perwakilan FPM Sumsel (Kelompok Generasi Perempuan Cerdas Sriwijaya/GPCS)
- Edukasi melalui Games dengan melibatkan semua peserta yang hadir

Seluruh rangkaian kegiatan digelar di Griya Agung (Istana Gubernur) Propinsi Sumatera Selatan mulai pukul 13.30 WIB s.d 17.00 WIB yang diikuti oleh 408 orang peserta terdiri Forum Perempuan Muda dampingan WCC Palembang, Komunitas lelaki muda dampingan WCC Palembang, perwakilan komunitas perempuan/laki-laki muda yang ada di Propinsi Sumatera Selatan, Organisasi Remaja, Perwakilan pelajar dari SMA sederajat di Kota Palembang, Perwakilan Mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di Propinsi Sumatera Selatan, Perwakilan Pemerintah, Media dan undangan lainnya

Tidak mudah membangun kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghapusan kekerasan seksual dan pencegahan perkawinan anak, apalagi menuntut tanggung jawab pemerintah atas kewajiban melakukan pemenuhan hak-hak perempuan khususnya korban kekerasan seksual. Dibutuhkan berbagai macam upaya dan kerja bersama berbagai pihak secara terus menerus untuk mewujudkannya. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan melakukan aksi kolektif dan mendukung segera disahkannya Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Forum Perempuan Muda Sumsel dan Women's Crisis Centre Palembang juga mengajak segenap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Selatan untuk bersatu, melintasi perbedaan jenis kelamin, agama, suku, kelas, maupun profesi, demi mewujudkan kesempatan, hak-hak, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, serta Indonesia yang lebih adil dan demokratis.



Foto 9. Panitia (FPM Sumsel & WCC Plg), Pengisi acara dan Ketua TP PKK Sumsel foto bersama setelah kegiatan

FPM Provinsi Lampung

Dampingan Damar Perempuan Lampung

Diskusi Kritis Forum Perempuan Muda bersama jaringan organisasi perempuan muda untuk Pencegahan perkawinan anak terdampak pandemi covid 19

Selama pandemi covid 19, perempuan muda dan anak mengalami kerentanan pada perkawinan anak/dini. Berdasarkan assesment dan analisis bersama perempuan muda dampingan DAMAR, perempuan muda di desa biasanya dihadapkan pada dua pilihan setelah lulus sekolah/putus sekolah yaitu menikah atau bekerja. Hal ini terjadi karena stereotype yang dibangun dimasyarakat patriarki yang menempatkan perempuan pada ranah, peran domestik dan reproduktif. Selama pandemi, perempuan muda terdampak mengalami penghentian kerja baik sektor formal dan informal. Ia terpaksa harus kembali ke kampung halaman dengan resiko kehilangan penghasilan dan kerentanan mengalami perkawinan dini atau perkawinan anak. Hal ini didukung data Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Januari – Juni 2020 dimana tercatat 266 kasus perkawinan anak.



Oleh karenanya, Damar memberikan informasi dan kesadaran baru perempuan muda untuk menjawab kebutuhan perempuan muda dalam rangka pencegahan perkawinan anak bersama Womens March Lampung dengan tema "**Debunking Early Marriage : Pelaminan Bukan Taman Bermain Anak"** pada 16 Mei 2020.

Diskusi ini melibatkan pembicara lintas jaringan aktifis perempuan diantaranya:

- Sely Fitriani S.H – Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, "Advokasi dan pencegahan pernikahan dini"
- Dr. Nur Rofifah Bil. Uzm – Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta, "Bagaimana agama menggambarkan pernikahan dini"
- Tunggal Pawestri – Konsultan Gender Hivos Southeast Asia, "Dampak ekonomi dan kesehatan mental bagi anak korban pernikahan dini dan korban rentan lainnya"
- Andi Suraidah – Jurnal Sang Pemula Malaysia, "Kaca mata hukum perkawinan anak di Malaysia"

Diskusi ini melibatkan 300 an *audience* yang melakukan registrasi diantaranya forum perempuan muda, forum komunitas perempuan akar rumput, jaringan organisasi perempuan lokal hingga nasional, organisasi keagamaan, akademisi, mahasiswa dan personal.

Adapun hasil Musyawarah Keagamaan yang menekankan pada pencegahan perkawinana anak:

- Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang berlangsung pada tanggal 25-27 April 2017 di Cirebon, memutuskan bahwa "hukum mencegah perkawinan anak yang menimbulkan pemudaratan dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga sakinah adalah wajib" jadi wajib mencegah perkawinan anak karena itu mengandung bahaya.
- Kemudian pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak. Ini menyasar pada orang-orang dewasa yang berada disekitar anak untuk membantu mencegah terjadinya kawin anak. Pihak-pihak tersebut ialah : Orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
- Hal yang bisa dilakukan pada anak yang sudah terjanjur mengalami pernikahan, sebagai bentuk perlindungan untuk anak adalah memastikan hak nya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak – hak anak lainnya terutama hak pendidikan, hak kesehatan, pengasuhan dari orangtua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Membangun Usaha Kreatif/Mikro Perempuan Muda untuk Kemandirian Ekonomi dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak dan Dini (kurang dari 21 tahun) pada Situasi Covid 19

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR bersama Forum Aktifis Perempuan muda Indonesia (FAMM-I) sebagai salah satu organisasi yang fokus melakukan penguatan aktifis perempuan muda melakukan penyelenggaraan bersama dalam rangka penguatan perempuan muda untuk

kemandirian ekonomi dan pencegahan perkawinan anak. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis 11 Juni 2020 dengan tema "Membangun Usaha Kreatif/Mikro Perempuan Muda untuk Kemandirian Ekonomi dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak dan Dini (kurang dari 21 tahun) pada Situasi Covid 19"





Dengan membangun motivasi kewirausahaan perempuan muda, diharapkan dapat mendukung kemandirian ekonomi dan penguatan posisi tawar sehingga dapat berkontribusi pada pencegahan perkawinan anak

Perempuan muda akan mandiri secara keuangan, mampu bersuara dan berani mengambil keputusan atas hal-hal yang menjadi kebutuhan dan kepentingannya sebagai perempuan (anak perempuan).

Selain memotivasi 20 anggota forum perempuan muda dampingan DAMAR yang ada di 5 kab/kota, kegiatan ini melibatkan lintas jaringan organisasi perempuan tingkat Nasional yaitu Kojigema Institut Malang, Sapuan Blitar, PPSW Burneo, LP2M, Pesada, Ambon. Diskusi ini melibatkan Narasumber dari DAMAR dengan pembahasan, **"Situasi perkawinan anak di Lampung",** Pelaku Usaha **"cerita perempuan muda dalam membangun usaha kreatif/mikro untuk kemandirian ekonomi**" dan Midha Karim/FAMM Indonesia dengan topik **"Pentingnya membangun usaha kreatif/mikro untuk kemandirian ekonomi dan pencegahan perkawinan anak"**

Catatan penting dari proses diskusi adalah sbb.:

- Pentingnya membangun kemandirian ekonomi terutama remaja perempuan untuk mencegah perkawinan anak
- Dalam memulai usaha diperlukan cara berpikir positif dan berjejaring yang baik untuk pemasaran online ataupun *offline*
- Modal tidak hanya berupa uang tetapi juga mental dan peningkatan kapasitas diri
- Menghindari biaya produksi besar dan pinjaman dengan bunga besar.

Juga terpetakan jenis usaha yang dilakukan perempuan muda yang fokus pada 2 jenis usaha yaitu fashion dan makanan dengan metode pemasaran 70% melalui online menggunakan media sosial.

Jenis Usaha	Metode Pemasaran
Penjahit	Direct selling
Penjahit	Direct selling
Sprei, ice cream, kue, dan snack (palugada)	Online
Palugada	Online
Pakaian (fashion)	Direct selling
Pakaian (fashion)	Online
Pakaian dan sepatu	Online
Sepatu	Iklan Medsos
Pakaian	Online
Cireng dan salad jelly	Online dan direct selling
Palugada	Online
Makanan dan snack	Online
Somay, Tekwan	Keliling
Pakaian	Online



Cerita Perubahan



Pembatra Aktif Yang Menunggu Surat Izin

Ditulis oleh : Ramona-Staf Flower Aceh



Tulisan ini adalah mengenai salah satu anggota pembatra yang senior. Lahir di Desa Karieng 70 tahun yang lalu. Nama beliau adalah Sawiyah, dan biasanya orang orang kampung memanggil nya dengan sebutan Wa Yah. Pekerjaannya sehari-hari menjahit atap rumbia milik orang dan menanam tanaman obat di halaman rumah nya. Wa Yah tinggal bersama dengan 1 anaknya dan 4 orang cucu.

Selain pekerjaannya menjahit atap rumbia, beliau juga seorang ahli dalam membuat obat-obat herbal seperti obat untuk penyakit lambung dan penyakit dalam perut semacam tumor atau sejenisnya (orang Aceh menyebutnya obat barah). Beliau menerima pengetahuan ini sebagai warisan dari ibundanya yaitu Nekmu; yang juga sangat ahli membuat dan meracik obat herbal. Namanya dikenal sampai ke kecamatan lainnya, sehingga setiap hari banyak orang yang berdatangan ke rumahnya untuk berobat.

Wa Yah sudah 3 tahun bergabung dengan Flower Aceh. Beliau sangat aktif di setiap rapat rapat/diskusi, bahkan beliau jarang absen di setiap diskusi. Wa Yah sangat tertarik dengan materi-materi yang diberikan oleh Flower Aceh. Selain itu Flower Aceh juga mendukung supaya anggota pembatra bisa mendapatkan surat izin agar dapat membuka usaha secara resmi. Wa Yah dalam sehari-hari bisa didatangi pasien dan alhamdulillah setiap yang berobat di tempat Wa Yah selalu Rasi alias manjur, dan beliau juga tidak menerima terlalu banyak; bayaran hanya menerima seikhlasnya saja.

Wa Yah berbagi pengalamannya kepada Flower Aceh bahwa dia sangat senang bisa membantu orang-orang yang sedang sakit dan Wa Yah juga sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan anggota pembatra Flower Aceh. Beliau bisa berjumpa dan bersilaturrahmi sesama anggota pembatra lainnya di kecamatan lain. Selain itu di setiap pertemuan kelompok mereka selalu berbagi pengalaman dan hal pribadi, baik itu tentang ramuan herbal maupun hal lainnya.

Harapan Wa Yah ke depannya, selama masih hidup Wa Yah akan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan jasanya dan selalu memberikan yang terbaik agar mereka bisa sembuh dan sehat. Harapan Wa Yah "Walau Flower Aceh nanti tidak mendampingi kami lagi, kami akan tetap membantu masyarakat dan selalu ingat materi-materi yang berguna yang diberikan oleh orang-orang Flower Aceh; dan tentunya kami bisa membuka usaha dengan resmi dan punya surat izin."

. .

Dari Diskusi Remaja sampai ke Wira Usaha

Ditulis oleh : Nursalimah-Staf PESADA Kabupaten Pakpak Bharat



Saya Artime Halawa, anak kedua dari 4 bersaudara. Saya lahir pada tanggal 7 Januari 2003 di Desa Nagatimbul Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat. Saya mengenal Pesada melalui kegiatan diskusi remaja di Desa Nagatimbul, di mana saat itu saya masih duduk di sekolah SMP.

Saat mengikuti kegiatan tersebut, saya tidak paham apa tujuan diskusi tersebut untuk kami remaja-remaja yang dikumpulkan. Saya terlibat kegiatan Pesada dari seorang teman bernama Artati yang sehari-hari saya panggil dengan kakak. Saya diajak untuk mengikuti diskusi karena pengakuannya banyak hal-hal baru yang diketahui melalui diskusi. Akhirnya coba-coba untuk ikut dan tertarik mengenai topik-topik yang didiskusikan.

Berbicara tentang tubuh selama ini dalam keluarga dan teman-teman di usia saya sangat tabu untuk dibicarakan, di mana jika menyebut alat-alat tubuh misalnya alat kelamin perempuan dan laki-laki dengan menggunakan bahasa local yang artinya tidak juga selalu jelas bagi saya. Setelah memperoleh pengetahuan melalui diskusi ,akhirnya memahami bahwa membicarakan tentang tubuh bukanlah hal yang tabu. Selain itu, anggapan bahwa perilaku dipukul, dimaki, dan dibentak merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan orang dewasa jika salah; ternyata hal tersebut salah dan merupakan kekerasan. Parahnya sebelumnya bahwa jika ada perempuan yang hamil di luar nikah akan dinikahkan tanpa bertanya pada korban dan selalu menyalahkan perempuan tersebut tanpa mencari apa akar persoalan dan mengapa hal itu bisa terjadi. Padahal tidak seharusnya dinikahkan karena menikah atau tidak menikah adalah hak korban dan bukan hanya pernikahan solusinya, sebab pernikahan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menambah persoalan baru kepada perempuan itu sendiri.

Saat ini saya duduk kelas 2 SMA, dan mulai dari SMP saya trelah terlibat aktif. Melalui pengalaman bergabung dengan kegiatan PESADA dengan pendidikan kritis secara reguler, pada tahun 2019 saya memberanikan diri menjadi pengurus di Forum Perempuan Muda (FPM). Dengan posisi sebagai sekretaris, saya setidaknya bisa bergabung dengan FPM antar desa, bertemu dan saling sharing melalui pertemuan FPM. Setelah terpilih, saya terus menggali dan bertanya pada pendamping dari Pesada hal-hal yang harus dilakukan di desa dan di sekolah. Pendamping melatih agar tidak takut berbicara di depan teman-teman. Saya mulai dari hal-hal kecil seperti terlibat menjadi pendidik sebaya saat pertemuan remaja dengan bertugas membangun suasana dan membuka diskusi. Tugas itu mendorong saya untuk bisa berbuat lebih lagi.

Belajar dari setiap diskusi dan mengikuti beberapa kegiatan FPM di Kabupaten dan Provinsi, saya mendapat teman baru dan banyak pengalaman-pengalaman dari kegiatan yang diikuti. Hal ini membuat saya semakin bersemangat dan percaya diri untuk membicarakan hak-hak perempuan dan kesehatan tubuh. Dari topik-topik yang sudah dibahas, akhirnya saya memberanikan diri untuk sosialisasi di sekolah SMA N 1 Kerajaan untuk pertama kalinya pada Maret 2020 dari organisasi OSIS dan PIK- R, yaitu menyampaikan bentuk-bentuk kekerasan dan berpacaran sehat.

Awalnya takut, grogi berbicara dengan teman sebaya karena merasa akan ditertawakan dan dianggap munafik. Tetapi setelah mendapat penyambutan yang hangat dari peserta, akhirnya saya semakin bersemangat. Selanjutnya saya mengajak teman-teman yang lain untuk ikut berdiskusi di desa untuk mendengarkan bersama topik-topik yang menurut saya menarik yang tidak didapatkan di sekolah. Semakin banyak topik yang dibahas, semakin bersemangat saya untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain terkait dengan hak-hak perempuan.

Pada Juni 2020, saya kembali memfasilitasi sosialisasi di sekolah tentang dampak perkawinan usia anak/dini. Pada sosialisasi kedua ini saya mulai santai menyampaikan karena pendamping dari PESADA sudah beberapa kali membawa saya ke desa-desa FPM yang lain untuk berdiskusi dengan topik yang berbeda-beda. Melalui diskusi di desa lain, semakin menambah pengalaman-pengalaman baru terkait pandangan-pandangan mereka. Hal-hal tersebut saya sampaikan pada sosialisasi dan peserta tertarik. Saya merasa berarti dan mulai percaya diri untuk mendidik teman sebaya. Pada bulan Juni itu juga bersama teman-teman di desa membangun kewirausahaan, yaitu membuat kue donat ubi yang unik . Kue olahan sudah kami jual di sekitar kami dan hasil penjualan terkumpul laba sebesar Rp 100.000 selama 3 minggu terakhir.

Harapan ke depan, dengan wira usaha, kami perempuan akan mandiri secara ekonomi sekedar memenuhi kebutuhan pembelian pulsa, peralatan kebutuhan sekolah dll. Selain itu ke depan, pendapatan hasil usaha bersama akan kami sisihkan yang akan digunakan untuk keberlanjutan kegiatan-kegiatan kelompok perempuan muda di desa.

Aku Ingin Pendidikan Yang Lebih Tinggi
"Perjuangan Perempuan Potensial"

Ditulis oleh : Misdayani (PPSW Sumatra)



Namanya adalah Nur Ainun. Biasa dipanggil 'Buk Ainun. Umurnya 40 tahun. Tinggal di Desa Bantayan Baru Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dia adalah ketua Koperasi Wanita Karsa Mulya sejak tahun 2017 s/d sekarang. Pendidikannya hanya tamat Sekolah Dasar (SD).

Pada tahun 2015, terbentuklah kelompok dengan nama Sumber Rezeki di desa Bantayan Baru dengan anggota 20 orang perempuan. Pembentukan kelompok ini difasilitasi oleh FKPAR atau kader lokal PPSW Sumatra bernama Ediawati yang berasal dari Koperasi Wanita Setia Amanah. Setelah itu, pendampingan rutin dilakukan oleh PPSW Sumatra dan FKPAR. Sejak tahun 2015 sudah diberikan pelatihan dasar-dasar koperasi, motivasi kelompok, kesetaraan gender, Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), kepemimpinan perempuan, *public speaking*, dan lain-lain. Setelah 3 kali melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan), pada tahun 2019 kelompok Wanita Sumber Rezeki berbadan hukum dan berganti nama menjadi Koperasi Wanita Karsa Mulya (WKM); dan hal ini diketahui oleh 'Buk Ainun sendiri.

'Buk Ainun merasa banyak sekali perubahan yang dialami oleh dirinya sendiri maupun keluarga setelah didampingi oleh PPSW Sumatra dan FKPAR serta program HKSR yang didapatkannya. Pengetahuan yang semakin bertambah, kepercayaan diri, dan teman yang semakin banyak adalah perubahan yang terjadi pada dirinya. Hal tersebut sangat berarti bagi Buk Ainun karena Buk Ainun adalah seorang perempuan yang hanya tamat SD. Dirinya tidak menyangka akan mengalami perubahan.

Semenjak Buk Ainun menjadi Ketua Koperasi WKM, dirinya mulai dikenal oleh masyarakat di desanya, termasuk pemerintah desa. Ditambah lagi koperasi WKM berbadan hokum, semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa terhadap koperasi dan Buk Ainun sendiri. Hal tersebut dibuktikan Koperasi WKM, apalagi dirinya sudah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di desa seperti Musrenbangdes, PKK, dan reses DPRD provinsi dan kabupaten.

"Pernah Bapak Kepala Desa secara khusus meminta kepada saya untuk menjadi pendata masyarakat miskin di desa", imbuhnya. "Tetapi persyaratan dari pekerjaan tersebut harus bisa mengoperasikan computer" tambahnya lagi. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Buk Ainun sendiri karena dirinya sendiri tidak bisa mengoperasikan computer. Anggota lain pun yang bertempat tinggal di desa juga tidak ada yang bisa mengoperasikan computer. Berbicara di depan orang banyak termasuk di depan pemerintah desa bahkan DPRD provinsi dan kabupaten sudah pernah dirasakan oleh Buk Ainun. "Walaupun merasa gugup, saya memberanikan diri untuk memberikan kata sambutan. Saya anggap orang yang di hadapan saya adalah tunggul. Itulah cara saya untuk menghilangkan rasa kegugupan saya" begitulah buk Ainun bercerita.

Selama ini, tentu saja ada hambatan dan tantangan yang dirasakan 'Buk Ainun. 'Buk Ainun merasa status pendidikannya yang menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi dirinya. Jika ada status pendidikan yang lebih tinggi, dirinya merasa akan menjadi lebih lengkap. Oleh karena itu, ketika dirinya dilibatkan dalam reses DPRD'provinsi dan kabupaten, dirinya selalu menyampaikan aspirasi untuk pendidikan perempuan agar pemerintah daerah menyediakan program Paket A, B, dan C kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Inilah harapan besar Buk Ainun kepada pemerintah agar dirinya bisa mempunyai pendidikan Paket C. Selain itu, dirinya juga mempunyai keinginan untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kepercayaan diri, *puclic speaking* yang baik, pengetahuan tentang desa dan pemerintah. Dirinya ingin menjadi perempuan potensial bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya.

Perempuan Muda Gigih yang Mandiri

Ditulis oleh : Muziatur Rahma-Staf LP2M



Indah Permata Ramadhani merupakan seorang perempuan muda berumur 18 tahun yang baru saja tamat SMA di tahun 2020 ini. "Indah-P" begitulah panggilan akrab dari teman-temanya. Indah mendapat julukan "P" karena terdapat lebih dari satu nama Indah dalam satu angkatan di sekolahnya. Indah-P bergabung dalam kelompok perempuan muda dampingan LP2M di Nagari Koto Tinggi Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman sejak tahun 2018, saat berumur 16 tahun. Sejak itu Indah-P aktif berdiskusi dalam forum perempuan muda baik di tingkat nagari, kabupaten, maupun provinsi. Dalam forum perempuan muda ini Indah-P mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya memahami dan menjaga kesehatan seksual reproduksi bagi perempuan muda. Bagi Indah-P forum perempuan muda merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan pertemanan. Selain aktif dalam Forum Perempuan Muda, Indah P juga aktif di organisasi sekolahnya.

Indah-P merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Saat ini Indah-P tidak tinggal bersama kedua orangtuanya. Sejak berumur 12 tahun Ibunya telah meninggal dunia sedangkan ayahnya telah menikah kembali dan tinggal bersama ibu sambungnya. Indah-P bersama kedua kakaknya kemudian memilih tinggal bersama *etek* dan *makwo* (saudara perempuan ibunya), dan melanjutkan sekolah di kampung ibunya. Mereka bertemu dengan ayahnya secara berkala ketika libur sekolah.

Kondisi itu membuat Indah-P harus berjuang untuk bisa menghasilkan uang sendir,i meski setiap bulan Indah-P menerima kiriman uang dari *Buya* (panggilan untuk ayah). Di usianya yang masih sekolah Indah-P harus berpikir bagaimana Ia bisa mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya dan meringankan beban keluarganya.

Setelah tamat sekolah menengah tingkat pertama di tahun 2017, Indah-P melanjutkan sekolahnya ke MAN 1 Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman. Setelah satu semester menjalankan aktivitas belajar di sekolah itu, Indah-P merasa kebutuhannya semakin meningkat. Keberadaan sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya membuat Indah-P harus mengeluarkan biaya transport lebih besar. Selain itu, lebih banyak jam tambahan yang harus Indah-P ikuti, sehingga biaya sekolah semakin meningkat. Namun Indah-P tidak tega meminta uang tambahan kepada *Buya* karena kakaknya yang sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri juga membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, Indah-P berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pada semester dua, Indah-P mencoba memulai usaha dengan berdagang gorengan di sekolah. Setiap hari Indah-P membawa gorengan buatan *Bako*-nya (Sebutan anak kepada pihak ayah di Suku Minang) untuk dijual di dalam kelas kepada teman-temannya. Ternyata hal ini mendapat respon dan dukungan yang baik dari teman-temannya. Tidak hanya sering membeli, teman-teman sekelasnya bahkan ikut mempromosikan kepada teman-teman di kelas lain. Indah-P akan mendapatkan komisi dari *Bako* jika berhasil menjualkan gorengan. Jika gorengan terjual sebanyak 65 buah dalam sehari maka Indah-P

akan mendapatkan uang Rp 15.000,- dan jika terjual sebanyak 75 gorengan maka Indah-P mendapatkan Rp 18.000,-. Dengan meningkatnya penjualan gorengan oleh Indah-P maka meningkat pula produksi gorengan *Bako*.
Semakin hari semakin banyak teman-teman dari kelas lain yang membeli gorengan ke kelas Indah-P, hingga pernah sampai menimbulkan keributan dalam proses belajar dan sampai guru mengetahuinya. Melihat kegigihan Indah-P berjualan di sekolah dan mendengar cerita alasan Indah-P jualan, guru pun memberikan ruang khusus untuk Indah-P berjualan di jam istirahat agar tidak mengganggu proses pelajaran.
Sukses dengan jualan gorengan, Indah-P pun ingin menambah jenis produk jualannya dengan menjual kebutuhan pribadi remaja perempuan seperti kaus kaki, jilbab, ciput jilbab, dan baju. Tak punya modal, Indah-P memberanikan diri untuk berbicara kepada pemilik toko kebutuhan pribadi langganannya agar Indah-P boleh menjualkan kembali produknya sebagai *reseller*. Indah-P merasa bahwa pemilik toko adalah perempuan yang baik dan ramah sehingga Ia yakin akan diizinkan untuk membantu menjualkan berbagai kebutuhan anak sekolah dan remaja seperti yang Ia butuhkan. Sesuai dengan keyakinannya, Indah-P pun mendapat izin untuk menjadi *reseller*. Indah-P berjualan secara online dengan memposting produk-produk di media sosial. Bila sudah ada calon pembeli, Indah-P baru akan membeli produknya ke toko dan diserahkan ke pembeli.
Melihat kegigihan Indah-P dalam memasarkan produk, pemilik toko pun memberikan kepercayaan kepada Indah-P untuk membawa produk yang akan dijual terlebih dahulu baru dibayar kemudian setelah produknya terjual. Bila ada produk yang tidak terjual bisa dikembalikan. Dengan modal kepercayaan dari pemilik toko, Indah-P menjadi lebih mudah menawarkan produknya kepada teman-teman sekolahnya. Melihat tingginya kebutuhan anak remaja terhadap pulsa, Indah-P pun memanfaatkan peluang ini juga untuk menjual pulsa kepada teman-temanya. Setiap ada kesempatan seperti pertemuan kelompok perempuan muda tingkat kabupaten maupun pertemuan di sekolah, Indah-P selalu membawa produknya dan menawarkan ke teman-teman sebayanya. Tidak ada rasa malu bagi Indah-P. Rata-rata dalam sebulan Indah-P bisa mendapatkan keuntangan Rp 300.000,- sampai Rp 400.000,-. Selain menambah penghasilan, menurut Indah-P berjualan bisa menambah teman dan jaringan.
Selama masa pandemi Covid-19, Indah-P tidak bisa berjualan lagi di sekolah karena siswa belajar di rumah. Namun hal ini tidak membuat semangat Indah-P dalam berjualan menurun. Indah-P justru berinisiatif untuk berjualan dengan sistem antar langsung ke pembeli. Selain itu, Indah-P juga menjual masker yang dibutuhkan oleh banyak orang selama masa pandemi Covid-19. Meski penjualan mengalami penurunan, Indah-P tetap semangat; karena beberapa produk jualannya masih diminati remaja di masa pandemi Covid-19 ini seperti masker, pulsa, dan kaos kaki.
Indah-P juga merupakan sosok perempuan muda yang gigih dalam berorganisasi. Meskipun banyak rentetan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan setiap hari, tidak menyurutkan niat Indah-P untuk ikut pertemuan perempuan muda. Indah-P selalu hadir dalam pertemuan Kelompok Perempuan Muda yang dilakukan LP2M. Namun karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum berangkat beraktivitas, Indah sering izin terlambat 15-20 menit dari jadwal pertemuan.
Menurut Indah-P informasi tentang kesehatan reproduksi remaja sangat minim Ia dapatkan dari sekolah maupun keluarga. Banyak mitos atau informasi salah tentang kespro remaja yang Ia terima seperti bisa hamil ketika berenang bersama laki-laki di kolam renang, dan mencuci rambut saat haid bisa menyebabkan haidnya terhenti paksa.
Indah-P tidak ingin menikah muda. Ia berencana menikah saat umur >21 tahun. Indah-P ingin melanjutkan kuliah terlebih dahulu. Namun karena keterbatasan biaya yang dimilikinya, Indah-P belum bisa melanjutkan kuliah tahun ini. Indah-P berharap bisa melanjutkan kuliah hingga ke luar negeri dengan beasiswa. Oleh karena itu, tahun ini Indah memutuskan untuk belajar di salah satu Pondok Pesantren di Depok untuk meningkatkan hafalan Al-Qur'an dan belajar bahasa arab. Indah-P mendapatkan kesempatan belajar di Pondok ini melalui jalur beasiswa. Indah-P berharap tahun depan juga bisa mendapat beasiswa kuliah ke luar negeri melalui jalur prestasi sebagai Tahfiz (penghapal Al-Qur'an).

"Kegiatan APM Membuatku lebih Percaya Diri"

Ditulis oleh: Sutiyem, Staf APM Jambi



Nama saya Kudri Apriadi, lahir di desa Kungkai pada tanggal 11 November 1995. Tinggal di desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat, salah satu kecamatan yang menjadi sasaran program HKSR Aliansi Perempuan Merangin. Saya bergabung dalam kegiatan APM mulai dari tahun 2016. Diawali dari diskusi dan pembentukan Forum lelaki muda pendukung HKSR, yang kemudian secara berkala mengikuti diskusi regulernya yang telah disepakai pertriwulan. Kegiatan yang saya ikuti diantaranya :

1. Diskusi Reguler tentang HKSR,
2. Seminar Peran tokoh adat dan agama dalam kasus – kasus pelanggaran HKSR Perempuan
3. Dialog Kenakalan remaja dan Pencegahan Narkoba
4. Perayaan Hari Perempuan internasional
5. Perayaan Hari kesehatan Seksual tahun 2019
6. Kampaye pencegahan perkawinan usia anak melalui radio dan medsos
7. Sosialisasi undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana batas usia perkawinan minimal 19 tahun untuk laki – laki dan perempuan
8. Peserta audiensi dengan DPRD Kabupaten Merangin

Perubahan yang saya alami semenjak mengikuti kegiatan APM banyak sekali, saya pribadi dalam publik speaking jadi bisa tertata dengan baik. Saya jadi lebih berani mencari jati diri, contohnya saya aktif di karang taruna sebagai sekretaris selama 2 periode. Pada tahun 2017 saya mengikuti ajang pemilihan bujang upik Merangin. Alhamdulillah saya mendapatkan gelar Bujang Merangin Intelgensia 2017.
Di tahun 2017 juga saya aktif di salah satu partai besar yaitu partai Nasdem yang dipimpin oleh bapak Surya Paloh. Di Merangin saya menjabat sebagai dewan pimpinan kecamatan untuk Bangko Barat, dan menjabat sebagai ketua Komisi Saksi Nasdem kabupaten Merangin. Pada tahun 2018, saya mengikuti pemilihan legislatif dari partai Nasdem Dapil I Merangin. Dan alhamdulllah walaupun belum berhasil,saya mampu memperoleh suara ke 4 dari II calon yang diusung partai Nasdem untuk Dapil I Merangin. Selanjutnya saya mengikuti pemilihan Bujang Gadis se Provinsi Jambi, meski belum berhasil sebagai juara, namun memperoleh gelar Bujang di Jambi.
Di antara banyak perubahan diatas, menurut saya perubahan yang sangat penting adalah bahwa dengan mengikuti kegiatan di APM, banyak sekali hal positif yang saya dapatkan. Sebagai pemuda kita harus berani menampilkan talenta kita pada khalayak umum. Intinya saya menjadi lebih percaya diri dan yakin dengan kemampuan diri yang saya miliki serta lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Saya mengalami perbedaan pandangan atau penerapan terhadap issu dan persoalan perempuan terutama kesehatan reproduksi, karena dulu saya tidak banyak mengetahui tentang apa itu kesehatan reproduksi. Namun setelah berproses dalam kegiatan- kegiatan yang saya ikuti di APM saya jadi banyak tahu dan paham tentang HKSR serta persoalan perempuan dan anak yang begitu luar biasa.
Dampak perubahan ini dalam hidup saya, dalam segi percaya diri lebih terbuka dengan orang lain, mudah mendapatkan teman dan lebih bertanggungjawab dalam bekerja. Harapan saya semoga APM selalu di depan dan banyak perubahan untuk generasi muda yang ada di lingkungan kita. Mampu menekan angka perkawinan usia anak dan mampu membawa perubahan keteman-teman muda, keluarga dan masyarakat.

Menyuarakan Dana Desa untuk Kesehatan Tubuh dan Reproduksi Perempuan & Anak



Nama saya Nakti Susilawati, nama panggilan sehari-hari saya adalah Nakti. Saya tinggal di Kabupaten Seluma, Kecamatan Sukaraja; tepatnya di desa Sidoluhur. Saya seorang Ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sebelum bergabung dengan kelompok Pelita Bunda yang dibentuk Cahaya Perempuan WCC (CP WCC), saya hanya Ibu rumah tangga biasa, sembari menjadi seorang peternak bebek yang setiap hari harus menyiapkan makanannya. Selain itu saya juga mengurusi Alat Kasidahan milik keluarga kami. Biasanya kami dipesan untuk tampil pada acara pernikahan.

Ketika saya dan anggota keluarga mengisi acara nikahan, saya gunakan untuk mencari informasi usia pengantin. Sering saya temukan pasangan pengantin masih kategori anak, umurnya masih belasan tahun. Informasi yang masih berhubungan juga saya peroleh dari media online dan media cetak di Bengkulu dan Kabupaten Seluma, kasus anak perempuan yang mengalami KTD, yang diselesaikan dengan cara menikahkan mereka. Maka itu angka KDRT dan perceraian di kabupaten Seluma termasuk yang tinggi karena yang menjadi korban dan pelaku kebanyakan anak yang menikah di usia anak.

Pada tahun 2016 adalah awal saya mengenal lembaga CP WCC memberikan sosialisasi mengenai program dan kegiatan mereka di desa Sidoluhur. Setelah itu saya dan ibu-ibu yang ada di desa Sidoluhur membentuk kelompok yang diberi nama CU Pelita Bunda yang berkegiatan diskusi kritis dan penabungan CU. Awalnya saya ingin bergabung karena saya sangat membutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) serta saya sangat tertarik dengan sistem simpan pinjam yang semuanya dikelola oleh kelompok dan keuntungan dan pemanfaatannya untuk anggota dan kelompok. Dari penabungan CU, dapat menjadi modal untuk dipinjam oleh Ibu-ibu anggotanya. Pinjaman digunakan untuk membantu biaya sekolah anak, pengembangan usaha kecil yang dimiliki oleh ibu-ibu usaha, dll. Keuntungan setiap tahun kemudian dialokasikan untuk dana sosial untuk membantu anggota kelompok dan warga yang tidak mampu di desa jika mendapat musibah, misalnya sakit. Anggota kelompok CU sendiri dari awal sudah dididik bagaimana menumbuhkan dan menguatkan kepedulian terhadap sesama perempuan.

Perubahan yang saya alami selama saya bergabung di kelompok perempuan dewasa dampingan Cahaya Perempuan WCC adalah mendapat ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, serta mengubah pandangan hidup saya bahwa perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembangunan. Pengetahuan mengenai Hak Azasi Perempuan dan HKSR memberikan kesadaran betapa pentingnya kesehatan mulai dari hal kebersihan tubuh seorang perempuan, pencegahan perkawinan usia anak, bahayanya merokok dan mengkonsumsi alkohol serta pengetahuan tentang adanya kebijakan dan Perundang-undang untuk Perlindungan Perempuan dan Anak. Kesadaran gender saya menguatkan pandangan saya bahwasanya seseorang lelaki tidak boleh berperilaku kasar/melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri) dan anak; karena tindakan itu termasuk dalam tindakan pelanggaran Hak Azasi Perempuan dan Anak. Dengan ber-CU saya memiliki kesadaran untuk menabung dan memanfaatkannya untuk modal usaha Sari Jahe dan pemasarannya.

Pendekatan Keluarga Peduli HKSR yang digunakan CP WCC suatu hal yang menarik buat saya, karena mampu menumbuhkan kesadaran tidak hanya di diri saya sendiri , tetapi juga bagi kelompok serta masyarakat lain di desa untuk peduli terhadap kesehatan tubuh dan reproduksi anggota keluarga mereka (perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan suami). Saya bersama anggota kelompok dan perempuan lain di desa datang ke pemeriksaan Tes IVA secara rutin, sementara para suami mulai bersedia mendampingi istri mereka ke Puskesmas dan Psoyandu untuk pemeriksaan kehamilan, Tes IVA dan konsultasi KB.

Faktor-faktor yang mendorong terjadi perubahan itu terjadi pada saya dan anggota kelompok selama adalah karena adanya dukungan dari suami dan keluarga kami. Dukungan ini tidak muncul seketika, tapi melalui proses yang panjang. Kawan-kawan CP WCC secara bersamaan juga menumbuhkan kesadaran gender bagi para suami, tokoh maasyarakat dan laki-laki muda desa. Saya dan anggota kelompokpun secara berkala mendapatkan penguatan kapasitas dari CP WCC melalui kegiatan antara lain :

- Diskusi Kritis Bulanan
- Penilaian Keluarga Peduli HKSR secara partisipatif
- Penguatan Pendamping Local Bulanan
- Pertemuan Tahunan FKPAR Kab. Seluma
- Pertemuan Tahunan FKPAR Provinsi Bengkulu
- Penguatan pengetahuan & keterampilan mengenai lobi dan advokasi kebijakan dan anggaran terutama dana desa untuk perempuan dan anak
- Diskusi tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkaitan dengan kegiatan kelompok perempuan dan anak.

Kapasitas yang saya miliki inipun telah meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran politik saya yang hanya tamatan SMP. Kemampuan kepemimpinan saya semakin menguat untuk menggerakan dan memotivasi anggota kelompok dalam mengadvokasi dana desa bagi kepentingan perempuan dan anak. Pada tahun 2019 ini, saya bersama kelompok CU Pelita Bunda berhasil mengadvokasi dana desa (DD) untuk kesehatan perempuan dan anak sbb :

- Dana Tes IVA dan Penyuluhan Pentingnya Deteksi Dini Kemungkinan Kanker Payudara sebesar Rp. 500.000,-
- Penyediaan Tablet Fe bagi perempuan muda dan dewasa supaya tidak ada lagi yang anemia dan pendarahan saat persalinan
- Dana persalinan untuk perempuan yang akan melahirkan, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat desa terutama keluarga miskin yang tidak tertolong dengan bidan desa pada saat melahirkan dikarenakan tidak ada BPJS Kesehatan dan uang.

Saya bersama kelompok juga terlibat aktif mendorong lahirnya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak tahun 2019. Dimulai dari proses lobi dan menyusun legal drafting peraturan tersebut bersama perangkat desa yang difasilitasi oleh CP WCC.

Dari beberapa perubahan terjadi, yang paling penting menurut saya adalah keberhasilan advokasi kebijakan pembangunan desa untuk pemberdayaan perempuan dan anak khususnya bagi kesehatan tubuh dan kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Keberhasilan ini menjadi penyemangat kami untuk terus bergerak, berjuang untuk kesetaraan perempuan dalam pembangunan. Bagi pemerintahan desa, hal ini menjadi acuan kerja mereka untuk konsisten mengalokasikan dana desa bagi kesehatan perempuan dan anak. Kebijakan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang telah ditetapkan mulai disosialisasikan dan diimplementasikan pada tahun 2020 sebagai upaya menurunkan angka kawin anak dan melindungi kesehatan seksual & reproduksi anak di desa.

"Pengetahuan Kespro dan CU untuk Pemenuhan Hak Perempuan"

(Anggota Kelompok "Selanting Jaya" Desa Sigam
Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim)



Nama saya Novi Triana, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak dan tinggal di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim. Selain mengurus rumah tangga, saya juga seorang Bidan Desa di Desa Karang Endah Selatan Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim. Dengan pekerjaan itu saya sudah terbiasa setiap harinya berhadapan dengan anak - anak balita dan ibu hamil.

Saya bergabung menjadi anggota kelompok "Selanting Jaya" Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim sudah 2 (dua) tahun. Awal saya bergabung itu adalah karena mendengar cerita kakak saya yang sudah lebih dahulu bergabung menjadi anggota kelompok Selanting Jaya Desa Sigam Kec. Gelumbang kab. Muara Enim. Saya merasa terinspirasi karena kelompok ini membahas atau menceritakan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan perempuan, serta mendukung dan memotivasi perempuan untuk lebih maju sehingga setara dengan laki- laki. Selain itu setiap bulan diadakan pertemuan rutin bulanan dengan berbagai materi yang disampaikan oleh tim WCC Palembang, terutama tentang materi kesehatan perempuan. Banyak ilmu pengetahuan baru yang saya dapatkan dan saya baru menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan terutama kesehatan reproduksi bagi perempuan. Materi yang saya dapatkan pada saat diskusi krtis bulanan di kelompok membuat saya lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum. Ilmu yang saya dapatkan juga saya sampaikan kepada ibu-ibu yang datang di Polindes tempat saya bekerja saat posyandu. Terus terang, saya menjadi punya banyak bahan/materi yang bisa saya sampaikan ketika kegiatan posyandu, dan hal ini membuat kegiatan penyuluhan maupun kelas ibu hamil menjadi tidak monoton.

Selain dari itu ada lagi hal yang menarik menurut saya setelah saya bergabung menjadi anggota kelompok, yaitu setiap anggota diwajibkan untuk menabung di CU atau menjadi anggota CU. Saya sangat merasakan manfaat menjadi anggota CU di antaranya: saya mempunyai tabungan sendiri, saya juga bisa mendapatkan pinjaman menambah modal untuk usaha saya berjualan online dan untuk membantu perekonomian rumah tangga. Sehingga saya sekarang menjadi mandiri dalam masalah perekonomian, karena saya bisa mempunyai penghasilan sendiri dari hasil berjualan online.

Saya tertarik meminjam di CU karena bunganya kecil dan menurun. Dan yang membuat saya menjadi tambah yakin untuk menabung dan meminjam di CU karena seluruh keuangan, pembukuan dipegang dan dikelola oleh pengurus kelompok sendiri yang tinggal satu daerah dengan kita.

Saya sangat senang bergabung menjadi anggota kelompok dampingan WCC Palembang dan juga menjadi salah satu pengurus di FKPAR Sumsel, karena setiap pertemuan FKPAR Sumsel di Palembang, saya bisa bertemu dengan teman-teman yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di kota ataupun kabupaten di Propinsi Sumsel lainnya.

Tantangan Menjaga Kesehatan Tubuh dan Reproduksi Selama Covid 19

Ditulis oleh : Ana Yunita Pratiwi-Staf Damar Perempuan Lampung



Sari Andi Yati, lahir di Panjang 4 April 1989, dan telah menyelesaikan pendidikan formal di tingkat SMA. Kemudian menikah di usia 20 tahun dan saat ini memiliki 3 orang anak. Ia pengurus Forum Perempuan Akar Rumput Bandarlampung, dan tinggal di Kelurahan Panjang selatan, Kec. Panjang Bandarlampung. Aktitifitas kesehariannya adalah berdagang, yang juga menjadi penghasilan utamanya.

Sejak 2015, ia terlibat aktif dalam penguatan program PERMAMPU yang fokus mempekuat kepemimpinan perempuan untuk advokasi pemenuhan kesehatan perempuan, gizi stunting dan HKSR dengan dukungan dari kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (MAMPU). Perubahan penting dalam dirinya adalah pengetahuan tentang hak kesehatan seksual reproduksi yang diperoleh melalui diskusi-diskusi kritis yang akhirnya membuat ia semakin memperhatikan kesehatan dirinya.

Di masa Covid 19, Bandarlampung merupakan wilayah zona merah di propinsi Lampung dengan jumlah pasien dengan pengawasan dan meninggal tertinggi. Sejak diberitakan adanya wabah pandemi Covid 19 dan himbauan pemerintah untuk *sosial/physical distancing*, ia mengikuti anjuran pemerintah dengan tidak keluar rumah selama 16 hari meskipun tetangga dan masyarakat lainnya masih tetap beraktifitas di luar. Ia sempat dibully teman-temannya ketika memilih di rumah saja. *"kamu di rumah aja bukannya kena Covid, malah meninggal karena kelaperan"* tambahnya.

Selama di rumah 16 hari pun ia dan keluarganya makan dengan stok seadanya, bahkan hampir setiap hari menu makannya telur dan mie instan. Ia sempat bingung mau sampai kapan ia tetap bertahan dirumah sedangkan kebutuhan makan, minum harus terus dicukupi. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk tidak di rumah saja dan kembali berdagang, meskipun rentan dan berisiko tertular karena harus bertemu dengan banyak orang, dan pembeli yang juga tidak tahu terjangkit atau tidak.

Perbedaan pendapatan hasil dagang pun ia rasakan saat pandemi. "*Sekarang harus ngirit banget ditambah cuaca hujan. Saya kan jual Thai tea dan tiap jam 10.00 malam sekarang polisi datang menghimbau untuk di tutup semua"*. Ia pun harus menghemat biaya pengeluarann untuk kebutuhan sehari-hari. Menu makan yang biasanya ada lauk, sayur dan buah; sekarang harus pilih salah satu saja. Uang jajan anak tetap dikeluarkan sekalipun anak tidak sekolah. "*Namanya anak-anak, jajan mah tetep meski gak sekolah. Kadang bikin pusing, karena anak-anak di rumah juga bosan, akhirnya ribut aja. Rumah gak pernah beres berantakan terus, kadang aku marah dan kalau aku udah cape banget aku biarin nanti ayahnya yang ngurus. Saya juga kan hamil dan dianjurkan setiap bulan periksa kehamilan dan cek lab saat usia kandungan 4 bulan di Puskesmas untuk memastikan kondisi kehamilan sehat. Saya belum memeriksakan ke puskes karena takut , kan banyak orang dan tidak tahu ada atau tidak yang terjangkoit covid 19*" tuturnya.

Meskipun demikian, ia menyadari bahwa pemeriksaan kehamilan tetap harus dilakukan. Meskipun berbayar, ia akhirnya melakukan pemeriksaan kehamilan di klinik bidan terdekat. Ia juga akhirnya memberanikan diri untuk cek HB ke Puskesmas karena keterbatasan biaya dan sempat ketakutan. Kecamatan Panjang diketahui positif covid berjumlah 20 orang. *"Aku kalau gak mendesak banget, gak berani ke luar rumah dan ke puskesmas". Dampak ekonomi Covid ini berpengaruh banget, dulu periksa kehamilan di puskesmas gratis terus, sekarang takut jadi periksa di klinik, posyandu juga gak ada".*

Ia juga jadi lebih perduli terhadap tubuh dan kesehatan seksual reproduksinya termasuk cek deteksi dini kanker payudara dan pemeriksaan layanan tes IVA. Dimana sebelumnya ia tidak pernah melakukan upaya tersebut untuk pencegahan .

VISI KONSORSIUM PERMAMPU

Perempuan mengalami dan menikmati pemenuhan
perlindungan dan penghormatan
Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (KHSR) yang lebih baik.

TUJUAN 1

Perempuan akar rumput (pedesaan, miskin kota, muda/usia 12-20 tahun
mempunyai kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi
untuk pemenuhan HKSR).

TUJUAN 2

Perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam
pelayanan HKSR yang mudah, cepat dan tepat dan bermutu.

TUJUAN 3

Institusi keluarga, adat dan agama melakukan perubahan
aturan adat dan tafsir agama
terkair HKSR (FMS).

TUJUAN 4

Pemerintah Desa dan Kab/Kota membuat kebijakan untuk
pemenuhan dan perlindungan HKSR.

WILAYAH CAKUPAN PROGRAM PERMAMPU



SEKRETARIAT PERMAMPU
Jl. Pancur Siwah No 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org Facebook: PermampuConsurtium